

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAH, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN  
TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DENGAN  
KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI  
(Studi pada Kabupaten Demak)**



**SKRIPSI**

**Karya Tulis sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi**

**Disusun Oleh :**

**DWI PURWANTI  
NIM : 1A.08.1267**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**

**BANK BPD JATENG**

**SEMARANG**

**2012**

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAH, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN  
TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DENGAN  
KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI  
(Studi pada Kabupaten Demak)**



**SKRIPSI**

**Karya Tulis sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi**

**Disusun Oleh :**

**DWI PURWANTI  
NIM : 1A.08.1267**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
BANK BPD JATENG  
SEMARANG  
2012**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAH, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP  
AKUNTABILITAS KEUANGAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI  
SEBAGAI PEMODERASI  
(Studi pada Kabupaten Demak)**

Disusun Oleh:  
DWI PURWANTI  
NIM : 1A.08.1267

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi  
STIE Bank BPD Jateng

Semarang, Juni 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Yohana Kus Suparwati, SE. MSi

NIDN. 0611056902

Suhana, SS, MM

NIDN. 0601107001

## HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAH, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP  
AKUNTABILITAS KEUANGAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI  
SEBAGAI PEMODERASI  
(Studi pada Kabupaten Demak)**

Disusun Oleh:  
DWI PURWANTI  
NIM : 1A081267

Dinyatakan diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi STIE Bank BPD  
Jateng pada tanggal

### TIM PENGUJI

1. Nur Anissa, SE, M.si, Akt  
NIDN.0604037302
2. Mekani Vestari, SE M.Si, Akt  
NIDN. 0016077401
3. Yohana Kus Suparwati, SE. MSi  
NIDN. 0611056902

### TANDA TANGAN

.....

.....

.....

Mengesahkan,  
Ketua STIE Bank BPD Jateng

Dr.H.Djoko Sudantoko, S.Sos, MM  
NIDN. 0607084501

## ABSTRAK

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas digunakan sebagai kontrol dalam pencapaian hasil dan kinerja pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *good governance*, standar akuntansi pemerintahan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas keuangan dengan adanya komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan sampel pejabat pengelolaan keuangan di Dinas Kabupaten Demak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis (MRA)* yaitu aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi. Hasil pengujian menunjukkan *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan sedangkan *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran dimoderasi dengan komitmen organisasi hasil tidak signifikan sehingga moderasi tidak mampu memperkuat hubungan variabel independen terhadap dependen. Ukuran kebaikan model penelitian ini adalah 50,1%.

Kata Kunci : *Good governance*, Standar Akuntansi Pemerintah, Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Keuangan.

## ABSTRACT

*Financial accountability is accountability of public institutions to use public funding be economically, efficiently, and effectively, as well compliance toward laws and regulations. Accountability is used as a control in the achievement of results and performance of government. The purpose of this study was to know the effect of good governance, accounting standards of government, and clarity of the budget target toward financial accountability with the organization commitment as moderating. Sampling method in this study using purposive sampling with samples of financial management officials in the Demak Regency. Analysis techniques used in this study is Moderated Regression Analysis (MRA) that is specific application of linear regression in which the regression equality contains elements of interaction. The test results show good governance, accounting standards of government and clarity of budget targets has a positive effect toward financial accountability while the good governance, accounting standards of government and clarity of budget targets be moderated with organization commitment the results not significant so that moderating is not capable to strengthen the independent variable toward the dependent. Size of the goodness model of this study is 50.1%.*

*Keywords: Good governance, Accounting Standards of Government, Clarity of Budget targets, Organization Commitment, Financial Accountability.*

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah saya,

Nama : Dwi Purwanti  
NIM : 1A.08.1267

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI”** telah saya susun dengan sebenar-benarnya dengan memperhatikan kaidah akademik dan menjunjung tinggi hak atas karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya unsur plagiasi maupun unsur kecurangan lainnya pada skripsi yang telah saya buat tersebut, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya dan saya siap menerima segala konsekuensi yang ditimbulkannya termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang telah diberikan kepada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab.

Semarang, Juni 2012

Dwi Purwanti

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.*

*(Alam Insyirah : 6-8)*

*“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

*(Al-baqarah : 286)*

*“ Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”*

*(Al-Baqarah : 153)*

**Skripsi ini ku persembahkan untuk:**

- ✧ **Bapak dan Ibu Tercinta**
- ✧ **Kakak dan Adik ku**
- ✧ **#Nomention yang selalu memenuhi otakku**
- ✧ **Saudara dan Sahabatku**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “**Pengaruh *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi**”.

Skripsi ini penulis susun, guna memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng Jurusan Akuntansi.

Peran serta berbagai pihak turut menentukan terselesaikannya penulisan skripsi ini, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Djoko Sudantoko, S.Sos, MM. selaku Ketua STIE Bank BPD Jateng.
2. Ibu Nur Anissa, SE, Msi, Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi STIE Bank Bpd Jateng.
3. Ibu Yohana Kus Suparwati. SE, MSi. selaku Dosen Pembimbing pertama telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam rangka menyusun skripsi ini.
4. Bapak Suhana, SS, MM. selaku Dosen Pembimbing kedua yang juga telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam rangka menyusun skripsi ini.
5. Ibu Nur Anissa, SE, M.Si, Akt selaku Deosen Penguji pertama yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan akhir skripsi ini.
6. Ibu Mekani Vestari, SE, M.Si, Akt selaku Deosen Penguji kedua yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan akhir skripsi ini.
7. Bapak Ali Mursid, SS. MM. selaku Dosen Wali yang membimbing penulis selama studi di STIE Bank BPD Jateng.

8. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dorongan, semangat, cinta serta doa hingga selesainya skripsi ini.
9. Kakakku Farikhin yang selalu memfasilitasi apa yang aku butuhkan selama penulisan skripsi ini dan selalu mendukung ku hingga skripsi ini selesai.
10. Seluruh Dinas di Kabupaten Demak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner.
11. Ririn dan Wuri, yang setia menemani menyebarkan kuesioner ke Kabupaten Demak dan slalu memberi dukungan hingga skripsi ini selesai.
12. Sahabat-sahabatku di STIE Bank BPD Jateng, Wawan Setiawan, Ahmad Rizqi, Denny Eko, Nunik, Septian, Fani, Lilis, Ahmad Asrori, Tony, dan Deni Irawan. Terimakasih sudah mendukung, menemani dan berbagi canda tawa, aku bakalan kangen kalian....
13. Teman-teman satu kos Alex club. “ *all is well*”
14. Teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menemani saat ujian wawan, septian, ririn, fani, rizma, dewi, endah, wiwik, laela, devi, caul, lia, yudi, yuda serta semua yang telah memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran ujianku
15. Teman-teman Angkatan 2008 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, semoga sukses semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang lebih baik. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca khususnya Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng.

Semarang, Juni 2012

Penulis

Dwi Purwanti

## DAFTAR ISI

Halaman Judul Skripsi .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Abstrak Bahasa Indonesia .....	iv
Abstrak Bahasa Inggris .....	v
Surat Pernyataan .....	vi
Halaman Motto dan Persembahan .....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar .....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	10
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	10
1.5 Kerangka Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Teori Kontijensi .....	12
2.2 Akuntabilitas Keuangan.....	13
2.3 <i>Good Governance</i> .....	17
2.3.1. Definisi <i>Good Governance</i> .....	17
2.3.2. Prinsip <i>Good Governance</i> .....	18
2.4 Standar Akuntansi Pemerintah .....	22
2.5 Kejelasan Sasaran Anggaran .....	25

2.6	Komitmen Organisasi .....	26
2.7	Penelitian Terdahulu .....	28
2.8	Hipotesis.....	30
2.8.1	<i>Good Governance</i> dan Akuntabilitas Keuangan .....	30
2.8.2	Standar Akuntansi Pemerintah dan Akuntabilitas Keuangan.....	31
2.8.3	Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan.....	32
2.8.4	<i>Good Governance</i> dan Komitmen Organisasi .....	32
2.8.5	Standar Akuntansi Pemerintah dan Komitmen Organisasi .....	33
2.8.6	Kejelasan Sasaran Anggaran dan Komitmen Organisasi .....	34
2.9	Model Penelitian.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Definisi Konsep .....	36
3.1.1	Akuntabilitas keuangan .....	36
3.1.2	<i>Good Governance</i> .....	36
3.1.3	Standar Akuntansi Pemerintah.....	36
3.1.4	Kejelasan Sasaran Anggaran.....	37
3.1.5	Komitmen Organisasi .....	37
3.2	Definisi Operasional .....	37
3.3	Populasi dan Sampel .....	39
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	40
3.5	Metode Analisis Data.....	41
3.5.1	Validitas .....	41
3.5.2	Reliabilitas .....	41
3.5.3	Analisis Statistik Deskriptif .....	42
3.5.4	Analisis Regresi Moderasi .....	42
3.5.5	Uji Asumsi Klasik .....	43
a.	Uji Normalitas .....	43

b. Heteroskedastisitas .....	44
c. Multikolinearitas.....	45
3.5.6 Uji Kebaikan Model .....	45
a. Koefisien Determinasi .....	45
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	46
3.5.7 Pengujian Hipotesis (Uji t).....	46

#### BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum.....	49
4.1.1 Kabupaten Demak .....	49
4.1.2 Perangkat Daerah .....	49
4.1.3 Deskripsi responden .....	50
4.2 Hasil Analisis Data .....	53
4.2.1 Uji Validitas .....	53
4.2.2 Uji Reliabilitas .....	56
4.2.3 Analisis Statistik Deskriptif.....	57
4.2.4 Analisis Regresi Moderasi.....	58
4.2.5 Uji Asumsi Klasik .....	61
a. Uji Normalitas .....	61
b. Heteroskedastisitas.....	63
c. Multikolinearitas .....	64
4.2.6 Uji Kebaikan Model .....	65
a. Koefisien Determinasi .....	65
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	66
4.2.7 Uji Hipotesis (Uji t).....	67
4.3 Analisis dan Pembahasan .....	68
4.3.1 Pengujian Hipotesis Pertama .....	68
4.3.2 Pengujian Hipotesis Kedua .....	69
4.3.3 Pengujian Hipotesis Ketiga.....	69
4.3.4 Pengujian Hipotesis Keempat .....	70
4.3.5 Pengujian Hipotesis Kelima.....	71
4.3.6 Pengujian Hipotesis Keenam .....	71

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Keterbatasan .....	73
5.3 Saran Penelitian .....	74
5.4 Implikasi .....	74

Daftar Pustaka

Lampiran

STIE BPD Jateng

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Definisi Operasional Variabel .....	37
4.1. Distribusi Responden .....	51
4.2. Diskripsi Responden .....	52
4.3. Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Keuangan .....	53
4.4. Hasil Uji Validitas <i>Good Governance</i> .....	54
4.5. Hasil Uji Validitas Standar Akuntansi Pemerintah.....	55
4.6. Hasil Uji Validitas Kejelasan Sasaran Anggaran.....	55
4.7. Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi.....	56
4.8. Hasil Reliabilitas .....	57
4.9. Statistik Deskriptif .....	57
4.10. Hasil Regresi Moderasi .....	59
4.11. Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov.....	63
4.12. Hasil Uji Multikolinieritas.....	65
4.13. Hasil Koefisien Determinasi.....	66
4.14. Hasil Uji - F .....	67
4.15. Hasil Uji - t.....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Kerangka Penelitian .....	11
2.1. Model Penelitian .....	35
4.1. Grafik Normal p-p plot.....	62
4.2. Grafik Scatter Plot.....	64

STIE BPD Jateng



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Kuesioner
2. Hasil Kuesioner
3. Tabel Validitas (R Product Moment)
4. Hasil Validitas dan Reliabilitas
5. Hasil Uji Normalitas (Normal P-Plot)
6. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatter Plot)
7. Hasil Regresi Moderasi
8. Surat Keterangan
9. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah. Reformasi ini ditandai dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Reformasi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara atau daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Putri, 2010).

Setiap entitas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan evaluasi kinerja. Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan daerah dan merupakan tanggungjawab atas akuntabilitas publik serta merupakan salah satu ukuran keberhasilan (kinerja) pemerintah daerah (Jamanson, 2005 dalam Zeyn, 2011). Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Dalam UU No 33 Tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud dari adanya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi pada sektor publik. Dengan kata lain

perkembangan sektor publik di Indonesia menuntut adanya akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun daerah.

Halim (2004) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Mahmudi (2005), mengemukakan salah satu akuntabilitas publik adalah akuntabilitas *financial* (keuangan) dimana mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja *financial* organisasi kepada pihak luar. Tahap-tahap akuntabilitas keuangan mulai dari perumusan rencana keuangan (proses penganggaran), pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan dan pelaksanaan pelaporannya (LAN, 2001; Malik Imron, 2005 dalam Zeyn, 2011 ). Di Indonesia, akuntabilitas publik menjadi sangat penting sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan *desentralisasi fiskal*, yaitu sejak Januari 2001 (Sukhemi, 2010). Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan *desentralisasi fiskal* tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*.

*Good governance* sering diartikan pemerintahan yang baik yang bersih dan berwibawa, memberikan pelayanan publik yang efisien, sistem pengendalian yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggungjawab (*accountable*) pada publiknya. Mardiasmo (2006), mengemukakan dalam memberikan layanan kepada masyarakat pemerintah daerah dituntut lebih *responsif* atau cepat dan tanggap. Terdapat tiga mekanisme yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah

agar lebih *responsif*, transparan dan akuntabel agar dapat mewujudkan *good governance* yaitu:

- 1). mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat,
- 2). memperbaiki *internal rule* dan mekanisme pengendalian, dan,
- 3). membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintah daerah.

*Good governance* menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. Prinsip utama yang mendasari *good governance* adalah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara sangat dibutuhkan karena aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan dan kestabilan ekonomi bangsa. Penetapan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 oleh Pemerintah mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah (Halim, 2001). Selanjutnya undang-undang ini diganti dan disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horisontal (kepada masyarakat melalui DPRD). Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo dan Tomasi, 1999 dalam Mardiasmo, 2006).

Mardiasmo (2003) mengemukakan pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya

akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openess*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 yang merupakan turunan dari UU No 22 Tahun 1999 menyebutkan secara tegas bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi (Zeyn, 2011).

Standar Akuntansi Pemerintah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas (Zeyn, 2011). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penggunaan SAP menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sehingga dapat menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor selain itu berfungsi untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disajikan pemerintahan. Perkembangan terakhir telah terbit PP No 71 Tahun 2010 didalam peraturan pemerintah tersebut dinyatakan bahwa SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan *financial* berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan berbasis kas.

Penelitian-penelitian mengenai akuntabilitas keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya masih sedikit. Peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai akuntabilitas keuangan dilakukan oleh Sukhemi (2010) tentang pengaruh penyajian neraca daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian neraca daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini mengidentifikasi bahwa pengguna mempresepsikan akuntabilitas laporan

keuangan tergantung dari cara penyajian neraca daerah, dimana laporan keuangan daerah dianggap akuntabel apabila memberikan informasi secara terintegrasi.

Widyaningsih, dkk (2011) meneliti hubungan efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian intern dengan kualitas akuntabilitas keuangan, dengan variabel intervening kualitas informasi laporan keuangan yang dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke masing-masing Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan hasil pemikiran yang mendasar mengenai upaya meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara efektif sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. Dengan sistem akuntansi yang telah berjalan efektif akan menyebabkan pengendalian berjalan semakin baik sehingga diharapkan akan memunculkan informasi laporan keuangan yang berkualitas dan mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintahan.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Zeyn (2011) membahas tentang pengaruh *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Penelitian ini mengambil sampel pada SKPD Kota Bandung. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dimana pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner masing-masing variabel diukur menggunakan skala *likert*. Hasil menunjukkan *good governance* yang memiliki komitmen yang tinggi akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Pelaporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah dengan komitmen organisasi yang tinggi akan berpengaruh pada akuntabilitas keuangan.

Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja financial pemerintah daerah (Indrawati, 2007 dalam Zeyn, 2011). Hasil audit Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2010 se- Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 36 kota atau kabupaten menunjukkan baru dua daerah yang memperoleh penilaian tertinggi dengan

predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yakni Kota Surakarta dan Kabupaten Jepara. Sebagian besar daerah masih mendapatkan pendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk Demak, opininya malah turun dari WDP menjadi *disclaimer*. Dari hasil opini tahun 2010, Auditor telah meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, hanya dua daerah yang dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Sedangkan sebagian besar pemerintahan lainnya pengelolaan keuangannya belum optimal sehingga masih perlu adanya perbaikan dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan (Suara Merdeka.com). Penurunan opini untuk Kabupaten Demak dikarenakan ada indikasi penyalahgunaan wewenang, tidak adanya perencanaan pembangunan, manajemen keuangan tak optimal dan manajemen pemerintah yang tidak jelas (Harian Semarang.com).

Kabupaten Demak merupakan obyek dari penelitian ini dikarenakan dari hasil audit Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) se- Provinsi Jawa Tengah hanya Kabupaten Demak yang memperoleh opini *disclaimer*, opini ini memiliki makna bahwa laporan keuangan oleh pemerintah daerah menjadi kurang transparan dan akuntabel. Siaran Pers (2011), mengemukakan pemberian opini TMP (*disclaimer*), dikarenakan masih lemahnya pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan antara lain masih banyak pencatatan keuangan tidak/belum dilakukan atau dilakukan namun tidak akurat penganggaran/perencanaan tidak memadai, pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya melalui mekanisme APBD dan tidak diatur dengan mekanisme yang memadai. Penyebab BPK memberi opini *disclaimer* diantaranya pos-pos pendapatan dan belanja pemerintah dalam laporan keuangan tersebut belum dibukukan atau diadministrasikan dengan baik sesuai peraturan perundang-undang dan standar akuntansi pemerintahan yang ada. Selain itu adanya pembatasan dan keterbatasan lingkup pemeriksaan dan kelemahan sistem pengendalian intern sehingga BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai dan belum ada tindak lanjut yang memadai dari pemerintah (Aboebakar, 2007).

Opini *disclaimer* tidak memiliki dampak langsung terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Demak. UU No 15 Tahun 2004 tidak menyatakan secara tegas sanksi atau penghargaan atas opini BPK terhadap pengelola laporan keuangan pemerintah. Meskipun tidak memiliki dampak langsung pada Pemerintahan Kabupaten Demak, namun opini *disclaimer* menunjukkan akuntabilitas keuangan yang masih lemah, sehingga perbaikan harus dilakukan agar kepercayaan masyarakat tidak hilang karena hasil audit BPK akan diakses masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban dan mendorong terciptanya *good governance*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Zeyn (2011) tentang Pengaruh *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian pada pemerintah Kabupaten Demak dan penambahan satu variabel yaitu kejelasan sasaran anggaran sesuai penelitian Abdullah (2005) tentang kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Adapun alasan ditambahnya variabel kejelasan sasaran anggaran karena pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Suhartono dan Solichin (2006) mengemukakan bahwa anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya untuk mencapai kinerja yang diharapkan masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat sehingga menjadikan lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah.

Kenis (1979) dalam Halim (2005) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik serta dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya. Dengan kejelasan sasaran anggaran, pendanaan dan pengeluaran akan diprioritas sesuai kebutuhan sehingga dana yang diimplementasikan untuk kegiatan tertentu dapat lebih efektif dan efisien dalam artian tepat sasaran, tepat skala kebutuhan dan tepat waktu.



Riyanto (2003) dalam Zeyn (2011) mengatakan perlunya penelitian mengenai pendekatan kontijensi berkaitan dengan kejelasan sasaran anggaran dan dampaknya agar hasil yang diperoleh lebih konsisten. Komitmen organisasi merupakan variabel yang memegang peranan penting dalam hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dan dampaknya. Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (*goal*) yang ingin dicapai organisasi (Mowday, et al 1979, Darma, 2004). Pada konteks pemerintah daerah, aparat yang merasa sasaran anggarannya jelas akan lebih bertanggung-jawab jika didukung dengan komitmen aparat yang tinggi terhadap organisasi pemerintah daerah. Aparat akan lebih mementingkan kepentingan organisasi dari pada kepentingan pribadi (Suhartono dan Solichin, 2006). Hal ini akan mendorong aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi dengan meningkatkan akuntabilitas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengambil judul **“Pengaruh *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi (Studi pada Kabupaten Demak)”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Apakah penerapan *good governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan?
- b. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan?
- c. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan?
- d. Apakah komitmen organisasi mempengaruhi hubungan penerapan *good governance* dengan akuntabilitas keuangan?
- e. Apakah komitmen organisasi mempengaruhi hubungan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh dengan akuntabilitas keuangan?
- f. Apakah komitmen organisasi mempengaruhi hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas keuangan?

## 1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. untuk menguji dan mengetahui apakah penerapan *good governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.
- b. untuk menguji dan mengetahui apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.
- c. untuk menguji dan mengetahui apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.
- d. untuk menguji dan mengetahui apakah komitmen organisasi mempengaruhi hubungan penerapan *good governance* dengan akuntabilitas keuangan.

- e. untuk menguji dan mengetahui apakah komitmen organisasi mempengaruhi hubungan penerapan standar akuntansi pemerintah dengan akuntabilitas keuangan.
- f. untuk menguji dan mengetahui apakah komitmen organisasi mempengaruhi hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas keuangan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan hubungan antar variabel secara empiris di lapangan dari konsep-konsep yang ada sehingga mampu mendukung pengembangan teori mengenai *good governance*, standar akuntansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas keuangan, dan komitmen organisasi.

##### b. Manfaat Praktis

###### – Bagi pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah pada umumnya dan Pemerintah Kabupaten Demak pada khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan instansi pemerintah, serta memberikan masukan dalam penentuan arah kebijakan yang berkaitan dengan strategi pencapaian akuntabilitas pengelolaan keuangan negara atau daerah yang berkualitas.

###### – Bagi akademisi

Sebagai sarana pembelajaran dan pengetahuan mengenai *good governance*, standar akuntansi pemerintahan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas keuangan dengan variabel *moderating* serta menambah bahan bacaan di Perpustakaan STIE Bank BPD Jateng.

## 1.5 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini berisi bagan yang menjelaskan proses atau alur penelitian yang dilakukan, dimulai dari studi pendahuluan hingga penarikan kesimpulan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Penelitian**



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang penjabaran teori dan konsep-konsep dari variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Teori dan konsep-konsep tersebut diperoleh melalui sumber-sumber buku, jurnal ilmiah maupun situs-situs yang berhubungan. Dalam bab dua ini, akan dibahas tentang penjelasan variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah *good governance*, standar akuntansi pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran. Penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi yaitu komitmen organisasi. Pada bagian akhir bab ini terdapat penjelasan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang akuntabilitas keuangan.

#### 2.1. Teori Kontijensi

Teori kontijensi dapat digunakan untuk menganalisis desain dan sistem akuntansi manajemen untuk memberikan informasi yang dapat digunakan perusahaan untuk berbagai macam tujuan (Otley, 1980 dalam Wulandari, 2011). Dalam kejelasan sasaran anggaran, penggunaan teori kontijensi telah lama menjadi perhatian para peneliti. (Riyanto, 2003 dalam Suhartono dan Sholichin, 2006) menyatakan bahwa perlunya penelitian mengenai pendekatan kontijensi dalam menguji faktor kontekstual yang mempengaruhi hubungan antara sistem pengendalian dengan kinerja termasuk sistem pengendalian akuntansi dan anggaran. Menurut Govindarajan (1998); Lucyanda (2001) dalam Suhartono & Solichin (2006), diperlukan upaya untuk merekonsiliasi ketidakkonsistenan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor kondisional antara variabel tersebut dengan kontijensi. Penggunaan variabel kontijensi tersebut memungkinkan adanya variabel-variabel lain yang bertindak sebagai variabel *moderating* atau

variabel *intervening* yang mempengaruhi hubungan antara *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas keuangan.

Dengan mendasar pada teori kontijensi maka ada dugaan bahwa terdapat faktor situasional lainnya yang mungkin akan saling berinteraksi didalam mempengaruhi suatu kondisi tertentu (Nazaruddin, 1998; Prasetyo, 2002; dan Astuti, 2005; Rahayu, 2008 dalam Apriadi, 2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan kontijensi dimana pendekatan ini memberi gagasan bahwa sifat hubungan yang ada dalam *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas keuangan instansi pemerintah mungkin berbeda dari situasi dengan situasi lain.

Pendekatan kontijensi dalam penelitian ini adalah variabel *moderating* (komitmen organisasi) yang dapat mempengaruhi hubungan antara *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas keuangan.

## **2.2. Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas secara harafiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Apriadi, 2010). Dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggungjawaban. Pertama, pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah. Kedua, pertanggungjawaban horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas.

Halim (2004) dalam Abdullah (2005) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian suatu tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi. Pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegangan pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Media akuntabilitas lain yang cukup efektif dapat berupa laporan tahunan tentang pencapaian tugas pokok fungsi dan target-target serta aspek penunjangnya seperti aspek keuangan, aspek sarana dan prasarana, aspek sumber daya manusia dan lain-lain. Dengan adanya akuntabilitas publik yang baik dan memadai maka kinerja organisasi pun dapat terarah dengan jelas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Abdullah dan Arisanti, 2010).

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok dalam pencapaian *good governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Akuntabilitas publik menghendaki birokrasi publik dapat menjelaskan secara transparan (*transparency*) dan terbuka (*openes*) kepada publik mengenai tindakan apa yang telah dilakukan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya (Zeyn, 2011). Pemerintah diminta melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif.

Hopwood dan Tomkins (1984), Mahmudi (2005) dalam Abdullah dan Arisanti (2010) mengemukakan dimensi-dimensi akuntabilitas sektor publik adalah

- a. akuntabilitas hukum dan kejujuran (*Accountability for probity and legality*),
- b. akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*),
- c. akuntabilitas program (*program accountability*),
- d. akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), dan
- e. akuntabilitas keuangan (*financial accountability*).

Salah satu akuntabilitas yang penting berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, korupsi, serta ketaatan terhadap perundangan (Zeyn, 2011).

Akuntabilitas menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan secara akurat dan tepat waktu tentang informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Widyaningsih, dkk, 2011)

Informasi yang kredibel adalah informasi yang handal dapat dipercaya (*reliable information*) yang sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi risiko. Reliabilitas informasi akan tumbuh dengan minimnya tingkat kesalahan penyajian data, tingginya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dan netralitas dalam pengungkapan (Mohamad, 2004:277 dalam Widyaningsih, dkk, 2011).

Lembaga-lembaga publik membuat laporan keuangan untuk memberikan informasi dan menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar karena terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik (Mardiasmo, 2002:21). Tahap-tahap dalam Akuntabilitas keuangan, mulai dari perumusan rencana keuangan (proses penganggaran), pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan,



evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporannya (LAN, 2001; Malik Imron, 2005; dalam Zeyn, 2011).

Menurut PP 24 Tahun 2005, tujuan pelaporan keuangan yaitu bahwa pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi seluruh pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi maupun sosial dengan cara:

1. penyediaan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. penyediaan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. penyediaan informasi mengenai jumlah sumber daya yang digunakan dalam kegiatan entitas serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. penyediaan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pemerintah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya;
6. penyediaan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas, apakah mengalami kenaikan atau penurunan.

Dengan kata lain akuntabilitas terkandung kewajiban menyajikan dan melaporkan pengelolaan keuangan daerah kedalam laporan keuangan daerah. Laporan keuangan salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik.

Wisnu (2007) mengemukakan bahwa akuntabilitas keuangan pada laporan keuangan dipengaruhi oleh kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1). laporan keuangan daerah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana baik dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari masyarakat;
- 2). jenis dan bentuk laporan keuangan daerah adalah seperti yang telah diatur dalam peraturan pemerintah tentang pertanggungjawaban pemerintah daerah

- (yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas serta penjelasan atas laporan keuangan tersebut);
- 3). laporan keuangan yang dibuat disajikan secara tepat waktu;
  - 4). laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa (Auditor) yang independen yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) guna memastikan bahwa laporan tersebut dibuat dan disajikan secara baik dan benar (sesuai peraturan perundang-undangan);
  - 5). pemerintah daerah merespon (tanggap secara cepat) terhadap hasil pemeriksaan (audit) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.

### **2.3. Good Governance**

#### **2.3.1. Definisi Good Governance**

*Governance* (tatakelola) pada pemerintah daerah adalah prinsip, pendekatan dan cara bagaimana pemerintah daerah menjalankan kegiatannya agar dapat mencapai tujuannya dan memenuhi tanggungjawabnya. *Governance* mencakup keterkaitan bagaimana pemerintah daerah, perwakilan masyarakat (DPRD), organisasi publik lainnya, dan mitra-mitra yang terkait menjalankan peran dan tanggungjawabnya, serta mencapai tujuan untuk melayani masyarakat dan pemakai layanan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai kaidah etika yang baik (Effendi, 2010).

*Good governance* mendorong terciptanya manajemen publik yang baik, kinerja pemerintahan yang baik, pengelolaan dana publik yang lebih baik, pelibatan partisipasi masyarakat yang lebih baik, dan pada gilirannya mendorong tersedianya hasil dan *outcome* yang baik bagi warga daerah maupun pemakai layanan pemerintah daerah. *Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain- domain (*state, privatesector and society*) (Zeyn, 2011).

Bank Dunia memberikan definisi *good governance* sebagai cara pemerintah mengelola sumberdaya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan *United Nasion Development Program* (UNDP) lebih memfokuskan pada cara pengelolaan negara dengan mempertimbangkan aspek politik yang mengacu pada proses pembuatan keputusan yang berimplikasi pada proses pembuatan kebijakan. Aspek ekonomi yang mengacu pada proses pembuatan keputusan yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup dan aspek administratif yang mengacu pada sistem implikasi kebijakan (Mardiasmo 2003).

### 2.3.2. Prinsip *Good Governance*

Mardiasmo (2002:18) menyebutkan karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik menurut UNDP meliputi :

1. *participation* (partisipasi), keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif;
2. *rule of law* (aturan hukum), kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu;
3. *tranparancy* (transparansi), transparansi dibangun atas dasar kebebasan atas dasar memperoleh informasi. informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan;
4. *responsiveness* (daya tanggap), lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*;
5. *consensus orientation* (berorientasi pada konsensus), berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas;
6. *equity* (berkeadilan), setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan;

7. *effectiveness and efficiency* (efektivitas dan efisiensi), pengelolaan sumberdaya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif);
8. *accountability* (akuntabilitas), pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan;
9. *strategic vision* (visi strategis). Penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Asian Development Bank menegaskan bahwa *good governance* dilandasi oleh empat pilar yaitu *accountability, transparency, predictability* dan *participation*.

Berikutnya (Osborne and Gaebler, 1992, OECD and World Bank, 2000 dalam Zeyn, 2011) menyebutkan tiga pilar elemen mendasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan *good governance* antara lain: transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

- a. transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi dan sosial.

Krina (2003), menyebutkan dua aspek dari prinsip transparansi yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Tujuan dari prinsip transparansi itu sendiri adalah untuk menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai tentang prosedur-prosedur, biaya dan tanggungjawab. Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Media massa memiliki peran penting dalam transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi dengan publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan

Transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator (Krina, 2003) :

- mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari proses pelayanan publik;
  - mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses di dalam sektor publik;
  - mekanisme yang memfasilitasi pelaporan, penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat didalam kegiatan melayani.
- b. partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan atas HAM, kebebasan pers dan kebebasan mengemukakan pendapat atau aspirasi masyarakat.

Partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (*beneficiaries*) atau objek belaka, melainkan agen pembangunan (subyek) yang mempunyai porsi yang penting (Max Pohan, 2000 dalam Setyawindari, 2011) . Tujuan dari penerapan prinsip partisipasi ini yaitu, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka.

Partisipasi diperlukan dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik. Dalam rangka penguatan partisipasi publik, beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah ( Krina, 2003):

- menyelenggarakan forum untuk menampung partisipasi masyarakat
- menyelenggarakan proses konsultasi untuk mengumpulkan masukan-masukan dari stakeholder termasuk aktivitas warga negara dalam kegiatan publik.

- menyediakan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.
- c. akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas dan bila belum ada atau tidak puas dapat kena sanksi.

Prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu: kemampuan menjawab dan konsekuensi. Prinsip ini menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai atau norma yang dimiliki para stakeholder yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah (Krina, 2003):

- a. tahapan proses pembuatan keputusan:
- pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
  - pembuatan keputusan harus memenuhi standar etika dan nilai yang berlaku
  - adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, sudah sesuai visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
- b. tahap sosialisasi kebijakan:
- penyebaran informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa maupun media komunikasi personal.
  - ketersediaan informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai.

Prinsip-prinsip *good governance* pada dasarnya merupakan prinsip yang saling terikat dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, ada hubungan yang erat dan saling mempengaruhi dalam mewujudkan *good governance*.

#### **2.4. Standar Akuntansi Pemerintah**

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan (Mardiasmo, 2002 : 148-149).

SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) mulai diberlakukan untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD Tahun Anggaran 2005 (Simanjuntak, 2010). SAP merupakan standar yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SAP merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan entitas pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Pengguna laporan keuangan menggunakan SAP untuk mempermudah pemahaman informasi yang disajikan dalam laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit. Dengan demikian SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor (Jamason, 2005 dalam Zeyn, 2011).

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja (PSAP KK, 2010)

Dalam PP No 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa, SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan

pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akruaI.

Komponen Laporan keuangan pokok terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*) (KK; PP No 71 Tahun 2010).

Manfaat akuntansi berbasis akruaI antara lain (Van Der Hoek, 2005 dalam momerandum Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2006):

- a. mendukung manajemen kinerja,
- b. memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik,
- c. memperbaiki pengertian akan biaya program,
- d. memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumber daya,
- e. meningkatkan pelaporan keuangan,
- f. memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset (termasuk kas).

Nazier dalam sosialisasi peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah, menyatakan dalam standar akuntansi pemerintah, laporan keuangan akan bermanfaat dan memenuhi tujuannya jika memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu :

- 1). relevan (*relevance*), relevan sangat berarti bilamana informasi dapat digunakan untuk membantu melakukan evaluasi mengenai kejadian masa lalu,



masa kini atau masa mendatang. Relevan mengandung arti pula bahwa informasi dapat digunakan untuk melakukan konfirmasi, koreksi dan evaluasi kejadian masa lalu. Agar relevan maka informasi:

- memiliki manfaat umpan balik: Informasi memungkinkan pengguna untuk dapat menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasalalu,
- memiliki manfaat prediktif: Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil di masa lalu,
- tepat waktu: informasi yang disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan,
- lengkap: Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;

2). andal (*reliability*), keandalan mengandung arti bahwa informasi seharusnya bebas dari kesalahan yang material dan bias, serta dapat menyajikan informasi kepada pengguna secara jujur;

3). dibandingkan (*comparability*), mengandung arti bahwa informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan, agar pengguna dapat mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan informasi bersangkutan dengan informasi yang terdapat pada laporan lainnya. Perbandingan dapat dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan antar organisasi dan perbandingan laporan keuangan antar periode. Implikasi yang muncul dengan adanya karakteristik dapat dibandingkan adalah para pengguna laporan keuangan harus diberikan informasi mengenai kebijakan yang diterapkan dalam penyajian laporan keuangan, perubahan atas penerapan kebijakan akuntansi dan pengaruh yang terjadi atas perubahan kebijakan tersebut;

4). dapat dipahami (*understandability*), informasi dapat dipahami bilamana pengguna dapat memahami laporan keuangan yang disajikan. Informasi-informasi yang dianggap rumit sebaiknya tidak dikeluarkan dari laporan keuangan, dengan pertimbangan bilamana dikeluarkan mungkin pengguna lainnya sulit memahami laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.

## **2.5. Kejelasan Sasaran Anggaran**

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis (PP No.24/2005).

Mardiasmo (2002:63) menyatakan bahwa peran anggaran sektor publik dapat dilihat berdasarkan tujuh fungsi utama yaitu: sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi manajemen, dan alat untuk menciptakan ruang publik.

Kenis (1979) dalam Suhartono & Solichin (2006) menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran dan salah satu karakteristik tersebut adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran adalah penggambaran seberapa luas sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik, dan dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Abdullah (2005) menyatakan bahwa tujuan dan sasaran APBD tersebut harus disesuaikan dengan lima kriteria berikut:

- 1). spesifik, artinya sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran

tersebut harus dapat memberikan inspirasi kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya,

- 2). terukur, artinya sasaran harus dinyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya,
- 3). menantang tapi realistis, artinya sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai,
- 4). berorientasi pada hasil akhir, artinya sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang akan dicapai, bukan pada proses atau cara mencapainya,
- 5). memiliki batas waktu, artinya sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai.

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja yang jelas untuk melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat.

## **2.6. Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi memiliki beberapa pengertian tergantung pada latar belakangnya. Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap sasaran (*goal*) yang ingin dicapai oleh organisasi (Mowday *et al.*, 1979 dalam Natalia, 2010).

Meyer *et al.*, (1993) dalam Abdullah dan Arisanti (2010) menyatakan komitmen organisasi adalah derajat sejauh mana keterlibatan seseorang dalam organisasinya dan kekuatan identifikasinya terhadap suatu organisasi tertentu, komitmen ditandai dengan tiga hal yaitu:

- a. suatu kepercayaan yang kuat terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai organisasi;
- b. kesiapan dan kesediaan untuk mengerahkan usaha keras demi kepentingan organisasi;
- c. keinginan yang kuat untuk memelihara hubungan yang kuat dengan organisasi.

Mowday et.al. (1982) dalam Natalia (2010) mengemukakan bahwa komitmen organisasi terbangun apabila masing-masing individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi dan atau profesi, yang antara lain adalah :

1. identifikasi (*identification*), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi;
2. keterlibatan (*involvement*), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan;
3. loyalitas (*loyalty*), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal.

Allen dan Meyer (1990) dalam Abdullah dan Arisanti (2010) membagi komitmen organisasi menjadi tiga komponen yaitu:

- a. komitmen afektif (*affective commitment*) yang menjelaskan bahwa seseorang memiliki keterkaitan secara emosional untuk mengidentifikasi diri dan merasakan keterlibatan secara langsung dalam suatu organisasi. Komitmen ini disifati oleh kepercayaan yang kuat terhadap tujuan organisasi, dan keinginan untuk melaksanakan usaha-usaha dengan baik yang dipertimbangkan akan memberi manfaat bagi kepentingan organisasi;
- b. komitmen kontinuan (*continuance commitment*) ini mengacu pada biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan persepsi pegawai tentang kerugian yang akan dihadapinya jika pegawai tersebut meninggalkan organisasinya. Dengan kata lain karyawan akan tinggal di organisasi karena dia membutuhkan organisasi tersebut, komitmen ini terbentuk atas dasar pertimbangan atas apa yang harus dikorbankan bila akan menetap pada suatu organisasi ;
- c. komitmen normatif (*normative commitment*) ini lebih menekankan kepada keterlibatan perasaan dan menggambarkan dedikasi seseorang untuk tetap tinggal dan bekerja pada organisasinya. Dengan kata lain karyawan bertahan menjadi anggota suatu organisasi karena memiliki kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi memang seharusnya dilakukan.

Komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Oleh karena itu komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) dan keterkaitan emosional bagi pekerja terhadap organisasi (Zeyn, 2011).

Luthans (1998) dalam Abdullah dan Arisanti (2010) menyebutkan jika seorang individu memiliki komitmen organisasi yang tinggi, maka pencapaian tujuan organisasi menjadi hal penting bagi organisasi tersebut, sebaliknya individu dengan komitmen organisasi yang rendah akan memiliki perhatian yang rendah pula dan cenderung untuk memenuhi kepentingan pribadi. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya komitmen yang tinggi dalam diri individu maka semakin tinggi kepeduliannya terhadap organisasi sehingga individu tersebut akan terus berusaha untuk menjadikan organisasinya kearah yang lebih baik.

## **2.7. Penelitian Terdahulu**

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang akuntabilitas keuangan, Sukhemi (2010) meneliti pengaruh penyajian neraca daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian ini mengambil sampel dengan cara *quota sampling* dengan tujuan berbagai subgrup dalam populasi stakeholder laporan keuangan pemerintah telah terwakili dengan berbagai karakteristik sampel sampai batas tertentu. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyajian neraca daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, sehingga mengidentifikasi bahwa laporan keuangan daerah dianggap akuntabel apabila memberikan informasi secara terintegrasi mengenai posisi aset, utang, dan ekuitas dana pemda, serta memberikan informasi mengenai dampak pelaksanaan anggaran.

Widyaningsih, dkk (2011) meneliti hubungan efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian intern dengan kualitas akuntabilitas keuangan: variabel intervening kualitas informasi laporan keuangan. Populasi penelitian ini adalah Pemerintahan Kabupaten atau Kota Jawa Barat. Hasil penelitian

menunjukkan hasil pemikiran yang mendasar mengenai upaya meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara efektif sesuai peraturan pemerintah yang berlaku, dengan sistem akuntansi yang telah berjalan efektif akan menyebabkan pengendalian berjalan semakin baik sehingga diharapkan akan memunculkan informasi laporan keuangan yang berkualitas sehingga hal tersebut akan mendorong meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.

Zeyn (2011) meneliti tentang *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Populasi penelitian ini adalah Instansi Pemerintah Kota Bandung dengan pengambilan sampel menggunakan *purpose sampling* dimana penulis menggunakan kriteria tertentu yang menjadi pertimbangan dalam penentuan sampel. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan *good governance* dan standar akuntansi yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Penelitian terhadap akuntabilitas juga dilakukan oleh Abdullah (2005) tentang kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Data diperoleh dengan menyebar kuesioner yang berisi tentang pernyataan seputar kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten atau Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian mengatakan terdapat hubungan yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya anggaran memiliki pengaruh secara langsung dalam peningkatan kinerja keuangan pemerintah melalui sasaran yang jelas, sistem pelaporan yang dapat diandalkan serta pengendalian akuntansi yang baik.

## 2.8. Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya merupakan proporsi atau tanggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 2.8.1. *Good Governance* dan Akuntabilitas Keuangan

Penerapan *good governance* dalam sektor publik berarti membangun kultur, nilai-nilai serta etika yang melandasi pengembangan perilaku profesional. Dengan diterapkannya *good governance*, diharapkan akan memberi arahan yang jelas pada perilaku kinerja serta etika profesi pada organisasi sektor publik sehingga akan dapat meningkatkan ketertarikan dan kepercayaan calon investor dan mitra usaha lainnya (Basri, 2010).

Kurniawan (2009) mengemukakan prinsip yang mendasar dan saling berhubungan dalam *good governance* adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi (keterbukaan) bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang hendak dipakai melaksanakan tugas dan bagaimana realitas pelaksanaan dan dampaknya, sehingga masyarakat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang implementasi kebijakan publik. Sedangkan akuntabilitas publik menghendaki birokrasi publik dapat menjelaskan secara transparan dan terbuka kepada publik mengenai tindakan apa yang telah dilakukan. Krina (2003) menyatakan selain kedua prinsip yang mendasar diatas, penerapan *good governance* akan terwujud dengan adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi diperlukan dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik.

Komponen-komponen tersebut penting karena penerapan *good governance* melalui transparansi, akuntabilitas dan partisipasi secara konsisten dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dimana dengan tata kelola pemerintahan yang baik akan menghindari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi karena lebih

transparan dalam penggunaan dana (Mardiasmo, 2002:18). Sehingga jika pemerintah menerapkan *good governance* secara konsisten dan efektif maka akuntabilitas keuangan akan semakin meningkat. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikembangkan hipotesis pertama sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Diduga penerapan *good governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.

### **2.8.2. Standar Akuntansi Pemerintah dan Akuntabilitas Keuangan**

Dalam PSAP KK (2010) menyebutkan bahwa setiap entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja. Standar akuntansi pemerintah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas (Zeyn, 2011).

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga akan mudah dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Selain itu laporan keuangan yang disajikan dengan basis akrual sesuai standar akuntansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel karena memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan suatu entitas (Simanjuntak, 2010). Sehingga penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam pelaporan keuangan akan meningkatkan akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikembangkan hipotesis kedua sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Diduga penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.



### **2.8.3. Kejelasan Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan**

Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Kenis (1979) dalam Suhartono & Solichin (2006) menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran memberikan reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan kerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap karyawan terhadap anggaran, kinerja anggaran dan efisien biaya pada pelaksanaan anggaran secara signifikan jika sasaran anggaran dinyatakan secara jelas.

Menurut Kenis (1976) dalam Suhartono & Solichin (2006), Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga jika kejelasan sasaran anggaran dinyatakan secara jelas maka akuntabilitas keuangan semakin meningkat. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikembangkan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Diduga kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.

### **2.8.4. *Good Governance* dan Komitmen Organisasi**

*Good governance* merupakan prinsip pengelolaan perusahaan yang bertujuan untuk mendorong kinerja perusahaan serta memberi nilai ekonomis bagi pemegang saham maupun masyarakat secara umum. Prinsip ini diperlukan sebagai upaya untuk meraih kembali kepercayaan investor dan kreditur, untuk memenuhi tantangan global, meminimalkan kerugian dan biaya pencegahan atas penyalahgunaan wewenang oleh pengelola.

Keberhasilan implementasi *good governance* banyak ditentukan oleh itikad baik ataupun komitmen anggota organisasi untuk sungguh-sungguh mengimplementasikannya (Basri, 2011). Komitmen organisasi menunjukkan suatu daya seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi. Seorang karyawan yang memahami dan menerapkan *good governance* secara benar dan didukung komitmen organisasi yang tinggi, maka akan mempengaruhi perilaku profesional seseorang dalam berkarya dengan orientasi pada kinerja yang tinggi untuk mencapai tujuan akhir (Basri, 2011). Dengan demikian adanya suatu komitmen diharapkan mampu menjadi dorongan bagi seseorang untuk bekerja lebih baik karena komitmen yang tepat akan memberikan motivasi yang tinggi dan memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas publik terutama pada akuntabilitas keuangan. Dari uraian tersebut maka hipotesis ke empat dari penelitian ini adalah

H<sub>4</sub>: Diduga penerapan *good governance* dengan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.

#### **2.8.5. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Komitmen Organisasi**

Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan standar yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan daerah. Penggunaan laporan keuangan menggunakan SAP akan mempermudah dalam memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Simanjuntak (2010) menyatakan salah satu penyebab kelemahan penyusunan laporan keuangan pada beberapa kementerian atau lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya SKPD penerima dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan.

Dalam mencapai keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan lebih akuntabel, pimpinan dan karyawan harus memiliki komitmen organisasi yang tinggi, dimana dukungan yang kuat dari pimpinan dan rasa ikut memiliki yang dimiliki karyawan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Zeyn (2011) mengemukakan jika pekerja merasa terikat dengan nilai organisasional yang ada maka mereka akan merasa senang dalam bekerja, sehingga akan

memiliki tanggungjawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas secara sukarela. Dengan demikian penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam laporan keuangan pemerintah dan kominten organisasi yang tinggi akan meningkatkan akuntabilitas keuangan instansi pemerintah daerah. Maka hipotesis kelima dari penelitian ini adalah:

H<sub>5</sub>: Diduga penerapan standar akuntansi pemerintah dengan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.

#### **2.8.6. Kejelasan Sasaran Anggaran dan Komitmen Organisasi**

Riyanto (2003) dalam Apriadi (2010) menyatakan bahwa hubungan karakteristik anggaran, dalam hal ini kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas keuangan instansi pemerintah, dipengaruhi oleh faktor-faktor individual yang bersifat *psychological attributes*. Efektif atau tidaknya kejelasan sasaran anggaran sangat ditentukan oleh *psychological attribute* dalam penelitian ini komitmen organisasi. Implikasinya, faktor-faktor individual tersebut berfungsi sebagai pemoderasi dalam hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas keuangan.

Komitmen organisasi menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Komitmen organisasi akan menumbuhkan pemahaman dan kepercayaan mengenai tujuan dari organisasi, sehingga pejabat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat anggaran menjadi relatif lebih tepat. Adanya komitmen yang tinggi berimplikasi terjadinya akuntabilitas yang tinggi pula.

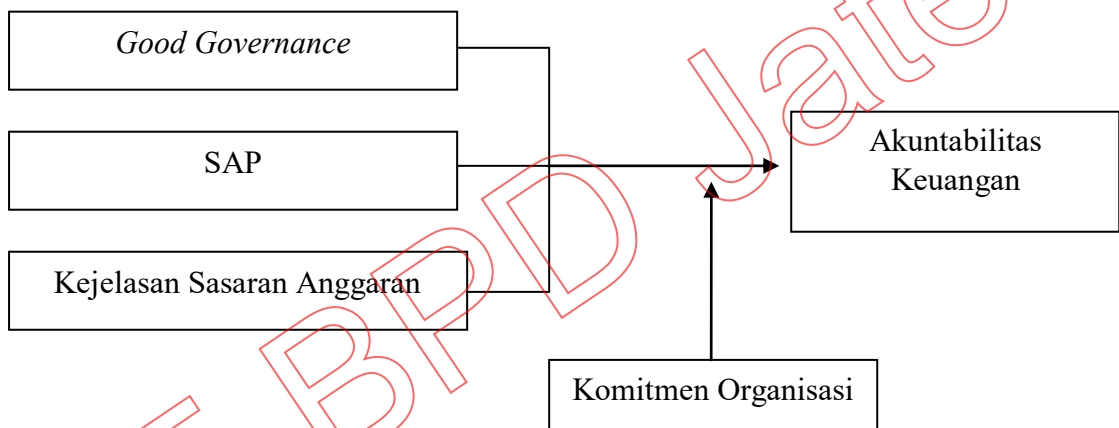
Kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah pejabat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen organisasi yang tinggi dari pejabat pemerintah daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggungjawab terhadap penyusunan anggaran dan keterlibatan secara langsung dalam mencapai tujuan organisasi

(Suhartono dan Solichin, 2006). Dengan demikian, semakin jelas sasaran anggaran yang diterapkan pejabat pemerintah daerah dan didorong oleh komitmen organisasi yang tinggi, akan meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Maka hipotesis keenam dari penelitian ini adalah:

H<sub>6</sub>: Diduga kejelasan sasaran anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.

## 2.9. Model Penelitian

Gambar 2.1



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Definisi Konsep**

Definisi konsep adalah suatu definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Konsep-konsep yang akan dikemukakan dalam penelitian ini berkaitan dengan definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

#### 3.1.1. Akuntabilitas Keuangan (Y)

Akuntabilitas keuangan adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2004).

#### 3.1.2. *Good Governance* ( $X_1$ )

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan sejalan dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002:18).

#### 3.1.3. Standar Akuntansi Pemerintahan ( $X_2$ )

Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan,

belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD (PP no 71 tahun 2010).

#### 3.1.4. Kejelasan Sasaran Anggaran ( $X_3$ )

Sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suhartono dan Solichin, 2006).

#### 3.1.5. Komitmen Organisasi (M)

Merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (*goal*) yang ingin dicapai organisasi (Mowday et al., 1979 dalam Natalia 2010).

### 3.2. Definisi Operasional

Variabel penelitian dan definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional masing-masing Variabel**

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Akuntabilitas Keuangan (Wisnu, 2007)	pelaporan pertanggungjawaban.	laporan keuangan daerah sebagai pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana	ordinal
	jenis dan bentuk standar pelaporan	peraturan pemerintah tentang pertanggungjawaban (terdiri dari : neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas serta penjelasan atas laporan keuangan)	ordinal
	penyajian laporan yang tepat waktu	laporan keuangan disajikan tepat waktu	ordinal
	pemeriksaan (audit) atas pelaporan.	laporan keuangan tersenut di audit oleh pemeriksa (auditor) yang independen	ordinal
	kecepatan respon untuk memperbaiki	pemerintah daerah merespon (tanggap secara cepat) terhadap hasil pemeriksaan (audit)	ordinal

Penerapan <i>Good Governance</i> (X <sub>1</sub> ) (Krina, 2003)	transparansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya dan tanggungjawab</li> <li>- meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa</li> </ul>	ordinal
	partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kebebasan berpendapat</li> <li>- keterlibatan masyarakat</li> <li>- pengambilan keputusan yang demokratis</li> </ul>	ordinal
	akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.</li> <li>- pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya</li> </ul>	ordinal
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (kualitas informasi) (X <sub>2</sub> ) (SAP; Widyaningsih, dkk, 2011)	Relevan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memiliki manfaat umpan balik</li> <li>- memiliki manfaat prediktif</li> <li>- tepat waktu</li> <li>- lengkap</li> </ul>	ordinal
	Andal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penyajian jujur</li> <li>- dapat diverifikasi</li> <li>- netralitas</li> </ul>	ordinal
	dapat dibandingkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- konsistensi penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode</li> <li>- identifikasi kecenderungan (trend) posisi keuangan dan kinerja dalam suatu organisasi</li> </ul>	ordinal
	dapat dipahami	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna</li> <li>- dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan</li> </ul>	ordinal

		dengan batas pemahaman para pengguna	
Kejelasan Sasaran Anggaran (X <sub>3</sub> ) (Darma, 2004)	Sasaran anggaran APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sasaran-sasaran anggaran harus diuraikan secara jelas dan spesifik</li> <li>- anggaran memberikan informasi yang jelas atas sasaran yang harus dicapai</li> <li>- mengetahui skala prioritas dari setiap bagian sasaran anggaran</li> </ul>	ordinal
Komitmen Organisasi (M) (Mowday; Sopiah, 2008 dalam Wulandari, 2011)	efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rasa menjadi bagian dari instansi atau ikut memiliki (<i>sense of belonging</i>)</li> <li>- keterkaitan emosional (<i>emotional attached</i>)</li> <li>- <i>personal meaning</i></li> </ul>	ordinal
	<i>Continuence</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pilihan lain</li> <li>- benefit</li> <li>- biaya</li> </ul>	ordinal
	normatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- keyakinan untuk loyal</li> <li>- keyakinan akan etika</li> </ul>	ordinal

Pertanyaan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Persepsi responden terhadap indikator-indikator variabel akan diukur dengan 5 poin skala *Likert*. Tanggapan positif (maksimal) diberi nilai besar (5) dan tanggapan negatif (minimal) diberi nilai paling kecil (1) (Ghozali, 2011:47).

### 3.3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005:72). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Instansi



Pemerintah Kabupaten Demak, sasaran populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat di Kabupaten Demak. Informasi jumlah SKPD Kabupaten Demak diperoleh dari web site resmi Kabupaten Demak.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2005:73). Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* dimana peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang menjadi pertimbangan dalam penentuan sampel. Kriteria dalam penelitian ini adalah:

1. SKPD yang secara langsung memberikan pelayanan publik melalui program dan kegiatannya secara teknis. Sehingga sampel yang terpilih adalah Dinas di Pemerintah Kabupaten Demak.
2. Pejabat pengelola keuangan daerah yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran dan pelaporan yang terdiri dari kepala sub bagian program, kepala sub bagian keuangan, kasi bagian perencanaan dan pelaporan, dan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

#### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode angket. Metode ini menggunakan penyebaran kuesioner yang telah disusun secara terstruktur, dimana sejumlah pertanyaan tertulis disampaikan pada responden yang bersangkutan sesuai dengan kondisi yang dialami responden. Pertanyaan berkaitan dengan *good governance*, standar akuntansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai moderasi.

Penyebaran dan pengumpulan kuesioner dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan mengantar kuesioner langsung ke SKPD Demak. Dalam kuesioner ini nantinya responden akan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang tersedia. Masing-masing kuesioner disertai dengan surat permohonan untuk mengisi kuesioner yang ditujukan pada responden. Surat permohonan tersebut

berisi identitas peneliti, maksud penelitian yang dilakukan dan jaminan kerahasiaan data penelitian.

Dalam pengukurannya, setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu pernyataan, dengan skala penilaian 1 sampai dengan 5. Tanggapan positif (maksimal) diberi nilai besar (5) dan tanggapan negatif (minimal) diberi nilai paling kecil (1) (Ghozali, 2011:47).

### **3.5. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dengan menggunakan metode kuantitatif, diharapkan akan didapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat tentang respon yang diberikan responden, sehingga data yang berbentuk angka tersebut dapat diolah dengan menggunakan metode statistik. Pada penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu SPSS untuk menguji coba butir pertanyaan tersebut adalah valid.

#### **3.5.1. Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). Jadi, validitas adalah mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur.

Uji validitas dapat diketahui dengan melihat  $r$  hitung dengan  $r$  tabel. Apabila  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2011:53).

#### **3.5.2. Reliabilitas**

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil

dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011:47). Jawaban responden terhadap pertanyaan ini dikatakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak oleh karena masing-masing pertanyaan hendak mengukur hal yang sama. Jika jawaban terhadap indikator ini acak, maka dapat dikatakan bahwa tidak reliabel (Ghozali, 2011:48).

Pengukuran realibilitas dilakukan dengan cara *One Shot* atau pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Alat untuk mengukur reliabilitas adalah *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel, apabila hasil  $\alpha > 0,60$  (Ghozali, 2006:42).

### **3.5.3. Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan sampel atau deskripsi suatu data yang telah dikumpulkan dalam kondisi sebenarnya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum dan generalisasi (Ghozali, 2011:19). Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi yang diungkapkan untuk memperjelas deskripsi (Ghozali, 2011:19).

Analisis ditujukan untuk memberikan gambaran awal mengenai variabel-variabel penelitian yaitu *good governance*, standar akuntansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi, serta akuntabilitas keuangan.

### **3.5.4. Analisis Regresi Moderasi**

Analisis regresi moderasi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Serta melihat apakah variabel moderasi memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini untuk menganalisa akuntabilitas keuangan sebagai variabel dependen (Y), dengan *Good governance*

( $X_1$ ), Standar Akuntansi Pemerintahan ( $X_2$ ), Kejelasan Sasaran Anggaran ( $X_3$ ) sebagai variabel independen dan Komitmen Organisasi ( $Z$ ) sebagai Moderasi menggunakan *moderated regression analysis* dengan uji nilai selisih mutlak. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 |X_1 - Z| + \beta_6 |X_2 - Z| + \beta_7 |X_3 - Z| + e \quad [3.1]$$

dimana:

$Y$	=	akuntabilitas keuangan
$\alpha$	=	konstanta
$\beta_1 - \beta_7$	=	koefisien regresi
$X_1$	=	<i>good governance</i>
$X_2$	=	standar akuntansi pemerintahan
$X_3$	=	kejelasan sasaran anggaran
$Z$	=	komitmen organisasi
$e$	=	error

### 3.5.5. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian terhadap model penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengujian model tersebut apakah memenuhi asumsi klasik regresi, yang terdiri dari (Ghozali, 2011:105) :

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan digunakan dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggunakan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011:160).

#### 1. Analisis grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat *normal probability plot*. Dasar pengambilannya adalah:

- Jika penyebaran data mengikuti garis normal, maka data berdistribusi normal.
- Jika penyebaran data tidak mengikuti garis normal, maka data distribusi tidak normal

## 2. Analisis statistik

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan, oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik non parametrik *Kolmogorov Smirnov* (K-S). Dasar pengambilan keputusannya yaitu nilai signifikansi  $> 0,05$  maka model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

### b. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

Deteksi ada tidaknya problem heteroskedastisitas adalah dengan media grafik, apabila grafik membentuk pola khusus maka model terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

Dasar pengambilan keputusan :

1. jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas;
2. jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

c. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (independen). Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas (independen) yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas (independen) sama dengan nol (0). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011:105-106) :

1. mempunyai angka Tolerance diatas ( $>$ ) 0,1
2. mempunyai nilai VIF di di bawah ( $<$ ) 10

### 3.5.6. Uji Kebaikan Model

a. Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square = Adjusted R<sup>2</sup>*)

Koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dengan variabel independen (*good governance*, standar akuntansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran,) dalam menerangkan variasi variabel dependen (akuntabilitas keuangan). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimaksudkan kedalam model. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* (*Adjusted R Square*) pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghozali, 2011:97).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji – F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2011:98).

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ), dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Apabila nilai signifikansinya  $\leq 0,05$  maka hipotesis alternatif dapat diterima, artinya variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansinya  $> 0,05$  maka hipotesis alternatif tidak dapat diterima, artinya variabel-variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

### 3.5.7. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan Uji Signifikansi Parameter Individual ( Uji Statistik t), untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, maka digunakan pengujian yaitu uji – t.

Hasil pengujian tersebut akan menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis menggunakan uji t bertujuan untuk membuktikan apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikatnya. Uji t juga digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:98).

Perumusan hipotesis :

1.  $H_{01}: \beta_1 = 0$ , artinya *good governance* tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.  
 $H_{a1}: \beta_1 \neq 0$ , artinya *good governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.
2.  $H_{02}: \beta_2 = 0$ , artinya standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.  
 $H_{a2}: \beta_2 \neq 0$ , artinya standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.
3.  $H_{03}: \beta_3 = 0$ , artinya kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.  
 $H_{a3}: \beta_3 \neq 0$ , artinya kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.
4.  $H_{04}: \beta_4 = 0$  artinya komitmen organisasi tidak berpengaruh positif terhadap hubungan antara *good governance* dengan akuntabilitas keuangan.  
 $H_{a4}: \beta_4 \neq 0$ , artinya komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap hubungan *good governance* dengan akuntabilitas keuangan.
5.  $H_{05}: \beta_5 = 0$ , artinya komitmen organisasi tidak berpengaruh positif terhadap hubungan antara standar akuntansi pemerintah dengan akuntabilitas keuangan.  
 $H_{a5}: \beta_5 \neq 0$ , artinya komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara standar akuntansi pemerintah dengan akuntabilitas keuangan.
6.  $H_{06}: \beta_6 = 0$ , artinya komitmen organisasi tidak berpengaruh positif terhadap hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas keuangan.



$H_{a6}: \beta_6 \neq 0$ , artinya komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas keuangan.

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ), dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Apabila nilai signifikansinya  $\leq 0,05$  maka hipotesis alternatif dapat diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansinya  $> 0,05$  maka hipotesis alternatif tidak dapat diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBYEK DAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

##### **4.1.1. Kabupaten Demak**

Kabupaten Demak berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah bagian utara dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan kota Semarang sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah. Kabupaten Demak terdiri atas 14 kecamatan, yaitu Kecamatan Demak, Wonosalam, Karangtengah, Bonang, Wedung, Mijen, Karanganyar, Gajah, Dempet, Guntur, Sayung, Mranggen, Karangawen dan Kebonagung, yang dibagi lagi atas sejumlah 249 desa dan kelurahan terdiri dari 243 desa dan 6 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Demak.

##### **4.1.2. Perangkat Daerah**

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pada Kabupaten Demak Perangkat Daerah terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
5. Badan Kepegawaian Daerah
6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Penanaman Modal
7. Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Inspektorat

10. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
11. Dinas Kesehatan
12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
16. Dinas pekerjaan Umum, Perumahan, Pemukiman, Pertambangan dan Energi
17. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
18. Dinas Pertanian
19. Dinas Kelautan dan Perikanan
20. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
21. Kantor Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan
22. Kantor Lingkungan Hidup
23. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24. Kantor Perpustakaan dan Arsip
25. Satuan Polisi Pamong Praja
26. Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga
27. Sekretariat KPU

#### 4.1.3. Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan serta bekerja pada Dinas Kabupaten Demak. Dinas dipilih karena merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah. Dinas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Jumlah responden dalam penelitian mengenai pengaruh *good governance*, standar akuntansi pemerintahan, kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi dapat dilihat dari tabel distribusi responden berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Tabel Distribusi Responden**

Organisasi	Kuesioner	
	Di distribusikan	Diperoleh kembali
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	5	3
Dinas Kesehatan	5	5
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5	5
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5	4
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5	3
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5	5
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pemukiman, Pertambangan dan Energi	5	5
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	5	5
Dinas Pertanian	5	5
Dinas Kelautan dan Perikanan	5	4
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	5	5
<b>Jumlah</b>	55	49
Kuesioner yang rusak/ tidak dapat diolah		3
Kuesioner yang dapat diolah		46

Sumber: Data primer yang diolah

Pada tabel distribusi responden memperlihatkan, total kuesioner yang disebar sebanyak 55 kuesioner, setelah satu minggu peneliti mengambil kuesioner tersebut, jika ada dinas yang belum menyelesaikan pengisian, peneliti memberi perpanjangan waktu satu minggu lagi. Total kuesioner yang kembali sebanyak 49 namun ada 3 kuesioner yang kurang lengkap dalam pengisian sehingga jumlah kuesioner yang dapat diolah hanya ada 46.

Tabel berikut ini merupakan hasil deskripsi terhadap para responden yang telah melakukan pengisian kuesioner. Deskripsi dilakukan berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, golongan dan jabatan:

**Tabel 4.2**  
**Tabel Deskripsi Responden**

Keterangan Kategori		Jumlah	Prosentase
Jenis Kelamin	Pria	22	47,8
	Wanita	24	52,2
Umur	< 20 tahun	0	0
	20-29 tahun	7	15,2
	30-39 tahun	10	21,7
	40-49 tahun	20	43,5
	≥ 50 tahun	9	19,6
Pendidikan	SMA	4	8,7
	D3	4	8,7
	S1	29	63
	S2/S3	9	19,6
Golongan	II	6	13
	III	32	69,6
	IV	8	17,4
Jabatan	Kasubag program	6	13
	Kasubag keuangan	11	24
	Kasi perencanaan dan pelaporan	9	19,6
	Bendahara	20	43,4
Total		46	100

Sumber: Data primer yang diolah

Berikut ini analisa dari hasil deskripsi responden:

1. Berdasarkan jenis kelaminnya memperlihatkan bahwa jumlah responden wanita sebanyak 52,2% dan sedikit lebih banyak dibanding responden pria yaitu 47,8%. Hal ini menunjukkan tidak ada perbedaan jenis kelamin dalam merekrut pejabat untuk melakukan pengelolaan keuangan di Dinas Kabupaten Demak.
2. Berdasarkan umur memperlihatkan kebanyakan responden termasuk dalam kategori 40-49 tahun (43,5%). Dilihat dari umur menunjukkan bahwa responden sudah berpengalaman dalam bekerja.
3. Berdasarkan pendidikan memperlihatkan kebanyakan responden dalam pengelolaan keuangan mempunyai tingkat akhir pendidikan strata 1 (S1). Hal ini tentu disesuaikan dengan jabatan dan posisi yang dikerjakan.

4. Berdasarkan golongan memperlihatkan kebanyakan pegawai yang menangani pengelolaan keuangan pada dinas masuk dalam golongan III yaitu 69,6%
5. Berdasarkan jabatan pengelolaan keuangan ditangani oleh kepala sub bagian keuangan 24%, sub bagian program 13%, kasi perencanaan dan pelaporan 19,6% dan bendahara 43,4%.

## 4.2 Hasil Analisis Data

### 4.2.1 Uji Validitas

Hasil uji validitas yang digunakan untuk melihat sah atau valid tidaknya suatu kuesioner untuk dijadikan sebagai alat ukur variabel, dalam penelitian ini untuk menentukan valid tidaknya indikator dilakukan dengan melakukan perbandingan antara nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel, dimana dengan  $\alpha = 0,05$  dan  $n$  (sampel) = 46 didapat  $r$  tabel sebesar 0,291. Ketentuan untuk melihat validitas suatu indikator yaitu apabila :  $R_{hitung} > R_{tabel} = \text{Valid}$  dan  $R_{hitung} < R_{tabel} = \text{Tidak Valid}$ .

Hasil Uji Validitas pada variabel akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Keuangan**

Variabel	Indikator	$R_{hitung}$ (corrected item correlation)	$R_{tabel}$	Keterangan
Akuntabilitas keuangan	Indikator 1	0.428	0,291	Valid
	Indikator 2	0.348	0,291	Valid
	Indikator 3	0.392	0,291	Valid
	Indikator 4	0.654	0,291	Valid
	Indikator 5	0.424	0,291	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil dari perbandingan antara nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel memperlihatkan semua angka dari setiap indikator berada di atas nilai  $r$  tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan semua indikator yang digunakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur akuntabilitas keuangan.

Hasil uji validitas pada variabel *good governance* adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Validitas *Good Governance***

Variabel	Indikator	R <sub>hitung</sub> (corrected item correlation)	R <sub>tabel</sub>	Keterangan
<i>Good Governance</i>	Indikator 1	0.375	0,291	Valid
	Indikator 2	0.335	0,291	Valid
	Indikator 3	0.403	0,291	Valid
	Indikator 4	0.329	0,291	Valid
	Indikator 5	0.332	0,291	Valid
	Indikator 6	0.404	0,291	Valid
	Indikator 7	0.327	0,291	Valid
	Indikator 8	0.465	0,291	Valid
	Indikator 9	0.367	0,291	Valid
	Indikator 10	0.381	0,291	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil dari perbandingan antara nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel memperlihatkan semua angka dari setiap indikator berada di atas nilai  $r$  tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan semua indikator yang digunakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur *good governance*.

Hasil uji validitas pada variabel standar akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Validitas Standar Akuntansi Pemerintahan**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>R<sub>hitung</sub></b> <small>(corrected item correlation)</small>	<b>R<sub>tabel</sub></b>	<b>Keterangan</b>
Standar Akuntansi Pemerintahan	Indikator 1	0.540	0,291	Valid
	Indikator 2	0.545	0,291	Valid
	Indikator 3	0.445	0,291	Valid
	Indikator 4	0.547	0,291	Valid
	Indikator 5	0.374	0,291	Valid
	Indikator 6	0.330	0,291	Valid
	Indikator 7	0.414	0,291	Valid
	Indikator 8	0.417	0,291	Valid
	Indikator 9	0.478	0,291	Valid
	Indikator 10	0.418	0,291	Valid
	Indikator 11	0.343	0,291	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil dari perbandingan antara nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  memperlihatkan semua angka dari setiap indikator berada di atas nilai  $r_{tabel}$ . Dengan demikian dapat disimpulkan semua indikator yang digunakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur standar akuntansi pemerintahan.

Hasil uji validitas pada variabel kejelasan sasaran anggaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Uji Validitas Kejelasan Sasaran Anggaran**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>R<sub>hitung</sub></b> <small>(corrected item correlation)</small>	<b>R<sub>tabel</sub></b>	<b>Keterangan</b>
Kejelasan Sasaran Anggaran	Indikator 1	0.406	0,291	Valid
	Indikator 2	0.479	0,291	Valid
	Indikator 3	0.568	0,291	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil dari perbandingan antara nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  memperlihatkan semua angka dari setiap indikator berada di atas nilai  $r_{tabel}$ . Dengan demikian dapat disimpulkan semua indikator yang digunakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur kejelasan sasaran anggaran.



Hasil uji validitas pada variabel komitmen organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Uji Validitas Komitmen Organisasi**

Variabel	Indikator	R <sub>hitung</sub> (corrected item correlation)	R <sub>tabel</sub>	Keterangan
Komitmen Organisasi	Indikator 1	0.366	0,291	Valid
	Indikator 2	0.505	0,291	Valid
	Indikator 3	0.507	0,291	Valid
	Indikator 4	0.368	0,291	Valid
	Indikator 5	0.359	0,291	Valid
	Indikator 6	0.338	0,291	Valid
	Indikator 7	0.424	0,291	Valid
	Indikator 8	0.427	0,291	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil dari perbandingan antara nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel memperlihatkan semua angka dari setiap indikator berada di atas nilai  $r$  tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan semua indikator yang digunakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur komitmen organisasi.

#### 4.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yang digunakan untuk melihat kehandalan suatu indikator yang digunakan sebagai alat ukur variabel, dimana ketentuan untuk melihat reliabilitas adalah apabila *cronbach's alpha*  $\geq 0,60$  adalah reliabel dan *cronbach's alpha*  $< 0,60$  tidak reliabel. Berikut ini hasil uji reliabilitas :

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Hasil <i>Cronbach alpha</i> ( $\alpha$ )	Keterangan
Akuntabilitas Keuangan (Y)	0,688 > 0,60	Reliabel
<i>Good Governance</i> (X <sub>1</sub> )	0,705 > 0,60	
Standar Akuntansi pemerintah ( X <sub>2</sub> )	0,781 > 0,60	
Kejelasan Sasaran Anggaran (X <sub>3</sub> )	0,666 > 0,60	
Komitmen Organisasi (M)	0,709 > 0,60	

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil uji reliabilitas memperlihatkan nilai *cronbach alpha's* semua variabel diatas 0,06 artinya dari data yang didapat mampu menunjukkan jika indikator yang digunakan oleh variabel akuntabilitas keuangan, *good governance*, standar akuntansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi terbukti reliabel atau handal untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

#### 4.2.3. Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut ini dijelaskan statistik data penelitian:

**Tabel 4.9**  
**Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	46	28.00	45.00	38.7391	3.66627
X2	46	36.00	53.00	45.0217	3.92422
X3	46	6.00	15.00	12.2174	1.86086
Z	46	21.00	36.00	29.0435	3.91553
Y	46	18.00	25.00	22.0870	1.93018
Valid N (listwise)	46				

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan jumlah responden (N) ada 46, nilai minimum dari variabel akuntabilitas keuangan (Y) adalah 18,00 dan maksimum 25,00 dengan rata-rata 22,0870 dan standar deviasinya adalah 1,93018. Nilai minimum untuk variabel *good governance* ( $X_1$ ) sebesar 28,00 dan maksimum 45,00 dengan rata-rata 38,7391 dan standar deviasinya 3,66627. Variabel standar akuntansi pemerintah ( $X_2$ ) memiliki nilai minimum 36,00 dan maksimum 53,00 dengan rata-rata 45,0217 dan standar deviasi 3,92422. Variabel kejelasan sasaran anggaran ( $X_3$ ) memiliki nilai minimum 6,00 dan maksimum 15,00 dengan rata-rata 12,2174 dan standar deviasi 1,86086. Untuk komitmen organisasi (Z), nilai minimumnya 21,00, nilai maksimumnya adalah 36,00 dengan rata-rata 29,0435 dan memiliki standar deviasi 3,91553.

Hasil uji statistik deskriptif, memperlihatkan nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata dari masing-masing variabel. Ini berarti penyimpangan yang terjadi rendah sehingga penyebaran data normal.

#### **4.2.4. Analisis Regresi Moderasi**

Penelitian ini menggunakan *Moderate Regression Analysis* (MRA) untuk menguji pengaruh variabel moderasi. Model regresi yang digunakan yaitu model nilai selisih mutlak dari variabel independen (Frucot and Shearon, 1991 dalam Ghozali, 2011:235). Hasil pengujian dengan menggunakan regresi berganda adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Regresi Moderasi**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.619	.420		51.530	.000
	Zscore(x1)	.694	.265	.360	2.620	.013
	Zscore(x2)	.551	.258	.286	2.140	.039
	Zscore(x3)	.626	.264	.324	2.367	.023
	Zscore(z)	.055	.226	.028	.242	.810
	SNM1	.135	.340	.053	.398	.693
	SNM2	.215	.368	.073	.585	.562
	SNM3	.138	.288	.064	.481	.633

a. Dependent Variable: y

Sumber: Data primer yang diolah

Persamaan untuk hasil regresi moderasi yang didapat sebagai berikut:

$$Y = 21,619 + 0,694 (X_1) + 0,551 (X_2) + 0,626 (X_3) + 0,55 (Z) + 0,135 (SNM1) + 0,215 (SNM2) + 0,138 (SNM3) \quad [4.1]$$

Persamaan regresi moderasi tersebut mempunyai arti sebagai berikut :

1. Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar = 21,619. Artinya adalah apabila *good governance* , standar akuntansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi dan selisih mutlak masing-masing variabel dengan komitmen organisasi dalam keadaan tetap maka akuntabilitas keuangan masih bernilai positif.
2. Koefisien regresi *good governance* ( $b_1$ ) = 0,694. Artinya adalah setiap ada satu peningkatan terhadap *good governance* akan mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan sebesar 0,694 dengan asumsi standar akuntansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi dan selisih

mutlak masing-masing variabel dengan komitmen organisasi dalam keadaan tetap.

3. Koefisien regresi standar akuntansi pemerintah ( $b_2$ ) = 0,551. Artinya adalah setiap ada satu peningkatan terhadap standar akuntansi pemerintah akan mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan sebesar 0,551 dengan asumsi *good governance*, kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi dan selisih mutlak masing-masing variabel dengan komitmen organisasi dalam keadaan tetap.
4. Koefisien regresi kejelasan sasaran anggaran ( $b_3$ ) = 0,626. Artinya adalah setiap ada satu peningkatan terhadap standar akuntansi pemerintahan akan mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan sebesar 0,626 dengan asumsi *good governance*, standar akuntansi pemerintah, komitmen organisasi dan selisih mutlak masing-masing variabel dengan komitmen organisasi dalam keadaan tetap.
5. Koefisien regresi komitmen organisasi ( $b_4$ ) = 0,055. Artinya adalah setiap ada satu peningkatan terhadap komitmen organisasi akan mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan sebesar 0,055 dengan asumsi *good governance*, standar akuntansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran dan selisih mutlak masing-masing variabel dengan komitmen organisasi dalam keadaan tetap.
6. Koefisien regresi interaksi antara *good governance* dan komitmen organisasi ( $b_5$ ) = 0,135. Artinya adalah setiap ada peningkatan terhadap nilai selisih mutlak *good governance* dan komitmen organisasi akan mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan sebesar 0,135 dengan asumsi *good governance*, standar akuntansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran dan selisih mutlak standar akuntansi pemerintah dan komitmen organisasi, dan selisih mutlak kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi dalam keadaan tetap.
7. Koefisien regresi interaksi antara standar akuntansi pemerintah dan komitmen organisasi ( $b_6$ ) = 0,215. Artinya adalah setiap ada peningkatan terhadap nilai selisih mutlak standar akuntansi pemerintah dan komitmen organisasi akan

mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan sebesar 0,215 dengan asumsi *good governance*, standar akuntansi pemerintahan, kejelasan sasaran anggaran dan selisih mutlak *good governance* dan komitmen organisasi, dan selisih mutlak kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi dalam keadaan tetap.

8. Koefisien regresi interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi ( $b_7$ ) = 0,138. Artinya adalah setiap ada peningkatan terhadap nilai selisih mutlak standar akuntansi pemerintah dan komitmen organisasi akan mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan sebesar 0,138 dengan asumsi *good governance*, standar akuntansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran dan selisih mutlak *good governance* dan komitmen organisasi, dan selisih mutlak standar akuntansi pemerintah dan komitmen organisasi dalam keadaan tetap.

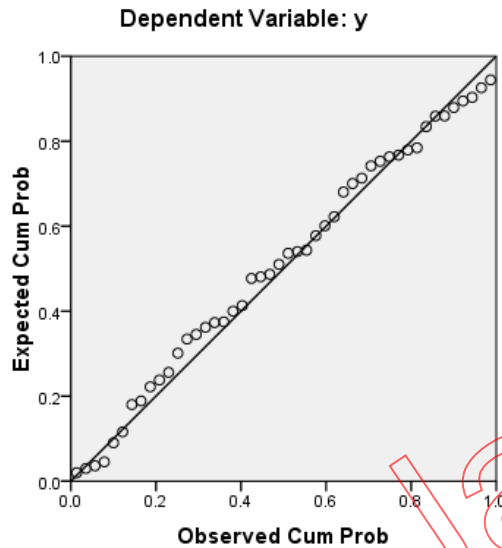
#### 4.2.5. Uji Asumsi Klasik

Dalam pengujian yang menggunakan teknik analisis regresi berganda, maka data-data yang digunakan harus memenuhi beberapa uji asumsi, uji tersebut terdiri dari :

- a. Uji Normalitas

Normalitas suatu data dapat dilihat dengan pengujian diantaranya menggunakan grafik, yaitu *normal probability plot*. selain itu uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non parametrik kolmogorov-smirnov (K-S) (Ghozali, 2011:163). Hasil normalitas adalah sebagai berikut:

### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



**Gambar 4.1**  
**Grafik Normal p-p Plot**

Sumber: Data primer yang diolah

Pada grafik *normal probability plot* memperlihatkan titik-titik menyebar dan mengikuti garis diagonalnya, dengan demikian berdasarkan kurva normal p-plot, data yang digunakan berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		residual
N		46
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000
	Std. Deviation	1.25240
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.054
	Negative	-.065
Kolmogorov-Smirnov Z		.438
Asymp. Sig. (2-tailed)		.991

a. Test distribution is Normal.

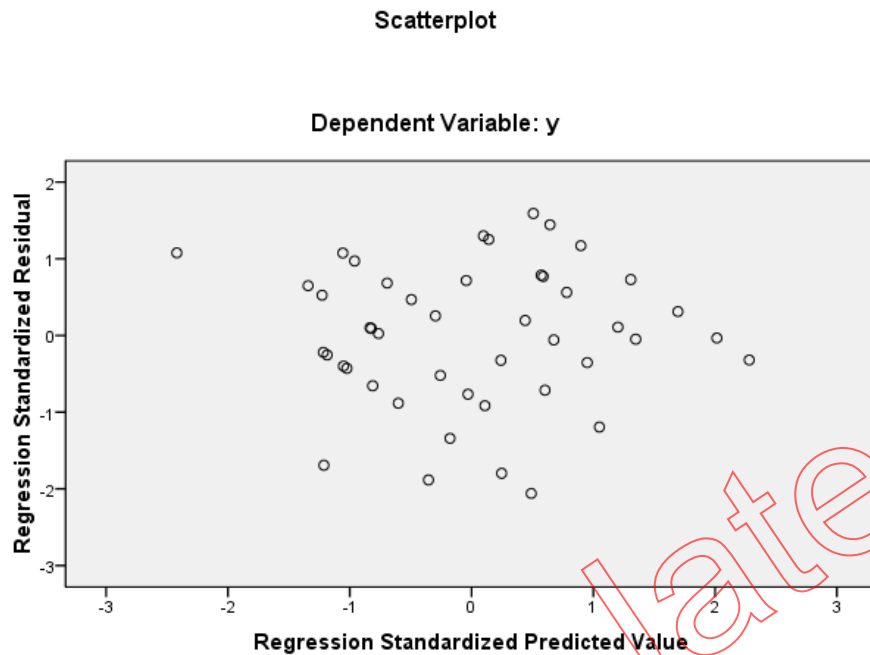
Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut, dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai *Kolmogorov Smirnov* adalah 0,438 dan signifikan pada 0,991. Hal ini berarti data residual berdistribusi normal karena signifikan  $> 0,05$  sehingga model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk menguji apakah variasi data yang digunakan bersifat sejenis atau tidak heterogen (heteroskedastisitas). Dalam penelitian ini deteksi ada tidaknya problem heteroskedastisitas adalah dengan media grafik scatterplot, apabila grafik tidak membentuk pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). Hasil pengujian tersebut adalah





**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
**(Grafik Scatter Plot)**

Sumber : Data primer yang diolah

Gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik tidak bisa membentuk pola tertentu yang jelas, dimana titik-titik tersebut menyebar ke seluruh daerah sumbu X maupun sumbu Y, sehingga grafik tersebut tidak bisa dibaca dengan jelas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi diantara variabel independen. Pada pengujian model regresi tidak diperbolehkan adanya multikolinearitas atau antara variabel independen tidak saling berkorelasi. Tidak terjadinya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance value* berada di atas 0,1 dan *variance inflation value* atau nilai VIF masing-masing variabel independen berada di bawah 10.

Hasil uji multikolinieritas yang didapat adalah sebagai berikut

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Zscore ( <i>Good Governance</i> )	0.588	1.702
Zscore (Standar Akuntansi Pemerintah)	0.622	1.608
Zscore (Kejelasan Sasaran Anggaran)	0.591	1.692
Zscore (Komitmen Organisasi)	0.805	1.243
SNM1	0.614	1.630
SNM2	0.706	1.416
SNM3	0.624	1.602

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil uji multikolinieritas memperlihatkan pada variabel independen kesemua nilai tolerance berada di atas 0,1 dan nilai VIF berada di bawah 10, maka diperoleh kesimpulan bahwa diantara variabel independen tidak saling berkorelasi atau tidak terjadi multikolinieritas.

#### 4.2.6. Uji Kebaikan Model

a. Koefisien Determinasi ( $Adjusted R Square = Adjusted R^2$ )

Hasil regresi juga mendapatkan hasil koefisien determinasi, koefisien determinasi ini digunakan untuk menunjukkan besarnya *good governance*, standar akuntansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi dalam menjelaskan akuntabilitas Kabupaten Demak. Hasil koefisien determinasi yang didapat adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.13**  
**Hasil Koefisien Deteminasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.761 <sup>a</sup>	.579	.501	1.36288	2.079

a. Predictors: (Constant), SNM3, Zscore(x2), SNM1, Zscore(z), SNM2, Zscore(x3), Zscore(x1)

b. Dependent Variable: y

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada nilai *adjusted r square* yang menunjukkan angka sebesar 0,501, dengan demikian bisa diartikan besarnya kemampuan *good governance*, standar akuntansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas keuangan adalah 50,1%, sementara sisanya sebesar 49,9% (100%-50,1%) akuntabilitas keuangan pada pemerintahan Kabupaten Demak ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti sistem akuntansi dan pengendalian.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil Uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji F**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	97.070	7	13.867	7.466	.000 <sup>a</sup>
	Residual	70.582	38	1.857		
	Total	167.652	45			

a. Predictors: (Constant), SNM3, Zscore(x2), SNM1, Zscore(z), SNM2, Zscore(x3), Zscore(x1)

b. Dependent Variable: y

Sumber: Data primer yang diolah

Nilai Uji F sebesar 7,466 dengan sig. 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan *good governance*, standar akuntansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan secara simultan diterima, karena nilai sig yang didapat < 0,05.

#### 4.2.7. Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara *good governance*, standar akuntansi pemerintahan, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas keuangan secara parsial, pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji t**

Variabel	Nilai t	Sig.
Zscore(X1)	2.620	0.013
Zscore(X2)	2.140	0.039
Zscore(X3)	2.367	0.023
Zscore(z)	0.242	0.810
SNM 1	0.398	0.693
SNM 2	0.585	0.562
SNM 3	0.481	0.633

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran menunjukkan hasil signifikan.. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansi untuk *good governance* sebesar 0,013 (  $p < 0,05$  ); standar akuntansi pemerintah signifikan 0,039 (  $p < 0,05$  ) dan kejelasan sasaran anggaran dengan signifikan 0,023 (  $p < 0,05$  ). Namun variabel *good governance*, standar akuntansi pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran setelah dimoderasi dengan komitmen organisasi menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini terlihat dari pengujian selisih mutlak antara masing - masing variabel dengan komitmen organisasi. Hasil nilai probabilitas signifikan *good governance* signifikansi sebesar 0,693 (  $p > 0,05$ ); standar akuntansi pemerintah signifikansi sebesar 0,562 (  $p > 0,05$  ) dan kejelasan sasaran anggaran signifikansi sebesar 0,633 (  $p > 0,05$  ).

#### **4.3 Analisis dan Pembahasan**

Penelitian ini mengangkat judul mengenai *good governance*, standar akuntansi pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi pada Kabupaten Demak. Hasil penelitian ini mengungkap hal-hali berikut:

##### **4.3.1 Pengujian Hipotesis Pertama: Penerapan *Good Governance* Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Keuangan.**

Berdasarkan nilai uji t pada *good governance* sebesar 2,620 dengan signifikan 0,013. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan penerapan *good governance* mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan diterima, karena nilai signifikansi yang didapat  $< \alpha = 0,05$ . Ini berarti semakin bagus tata kelola pemerintahan maka semakin tinggi akuntabilitas keuangan.

Pemerintah Kabupaten Demak sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* telah memberikan pertanggungjawaban yang transparan dan akurat dalam menyediakan informasi untuk menilai kinerja dan akuntabilitas publik

termasuk akuntabilitas keuangan. Dengan tatakelola pemerintahan yang baik akan menghindari adanya penyelewengan dan penyimpangan dalam menggunakan dana publik. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zeyn (2011) yang menyatakan penerapan *good governance* akan meningkatkan akuntabilitas keuangan.

#### **4.3.2 Pengujian Hipotesis Kedua : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Keuangan.**

Berdasarkan nilai uji t pada standar akuntansi pemerintah sebesar 2,140 dengan signifikan 0,039. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan penerapan standar akuntansi pemerintahan mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan diterima, karena nilai signifikansi yang didapat  $< \alpha = 0,05$ . Ini berarti laporan keuangan dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunannya akan meningkatkan akuntabilitas keuangan.

Akuntabilitas keuangan terkait dengan pelaporan keuangan, dimana laporan keuangan merupakan komponen terpenting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu pengukur kinerja keuangan pemerintah. Laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual akan memberikan informasi secara terintegrasi mengenai posisi aset, utang, dan ekuitas dana pemerintahan serta memberikan informasi mengenai dampak pelaksanaan anggaran sehingga informasi yang diberikan lebih bermanfaat dan dianggap lebih akuntabel.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Sukhemi (2010) dan Zeyn (2011) yang menyimpulkan standar akuntansi pemerintah dibutuhkan dalam penyajian laporan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan.

#### **4.3.3 Pengujian Hipotesis Ketiga : Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Keuangan.**

Berdasarkan nilai uji t pada kejelasan sasaran anggaran sebesar 2,367 dengan signifikan 0,023. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas

keuangan diterima, karena nilai signifikansi yang didapat  $< \alpha = 0,05$ . Ini berarti semakin jelas sasaran anggaran maka akuntabilitas keuangan akan meningkat.

Penyusunan anggaran harus disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang dinyatakan secara spesifik, jelas dan berorientasi pada hasil akhir agar mudah dipahami sehingga pemerintah akan lebih mudah mencapai dan mempertanggungjawabkan pemakaian anggaran. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Abdullah (2005) yang menyimpulkan sasaran anggaran yang spesifik memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas.

#### **4.3.4 Pengujian Hipotesis Keempat : Penerapan *Good Governance* Dengan Komitmen Organisasi Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Keuangan.**

Berdasarkan nilai uji t pada nilai selisih mutlak antara *good governance* dan komitmen organisasi sebesar 0,398 dengan signifikansi 0,693. Nilai signifikansi yang didapat  $> \alpha = 0,05$  sehingga tidak mampu menolak  $H_0$ . Dalam hal ini berarti variabel komitmen organisasi tidak dapat berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *good governance* dengan akuntabilitas keuangan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Zeyn (2011), yang menyatakan komitmen organisasi yang tinggi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik komitmen organisasi akan mendorong keberhasilan akuntabilitas publik termasuk akuntabilitas keuangan.

Perbedaan penelitian ini muncul karena adanya faktor situasional dimana masing-masing pejabat di Pemerintahan Kabupaten Demak memiliki komitmen organisasi yang masih rendah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Komitmen organisasi yang rendah akan membuat individu lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Mereka melaksanakan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud *good governance* karena itu merupakan suatu tugas. Rendahnya komitmen organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja.

#### **4.3.5 Pengujian Hipotesis Kelima : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Keuangan**

Berdasarkan nilai uji t pada nilai selisih mutlak antara standar akuntansi pemerintah dan komitmen organisasi sebesar 0,585 dengan signifikan. 0,562. Dari hasil tersebut nilai signifikansi yang didapat  $> \alpha = 0,05$  sehingga tidak mampu menolak  $H_{05}$ . Dalam hal ini berarti variabel komitmen organisasi tidak dapat berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara standar akuntansi pemerintah dengan akuntabilitas keuangan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Zeyn (2011), yang menyatakan komitmen organisasi memperkuat hubungan standar akuntansi pemerintahan dengan akuntabilitas keuangan. Hal ini diduga komitmen organisasi bukan merupakan faktor utama dalam pemilihan pejabat struktural. Pemilihan pejabat dimungkinkan dengan model jenjang karir senioritas, golongan/ruang, masa kerja sehingga pemahaman dan penggunaan SAP yang sangat diperlukan agar laporan keuangan berkualitas belum maksimal. Penyebab lain belum maksimalnya pemahaman adalah kurangnya tenaga akuntansi pada pemerintahan Kabupaten Demak di beberapa Dinas sehingga menyulitkan dalam memahami standar akuntansi pemerintah yang baru yaitu standar akuntansi berbasis akrual secara penuh.

#### **4.3.6 Pengujian Hipotesis Keenam : Kejelasan Sasaran Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Keuangan.**

Berdasarkan nilai uji t pada nilai selisih mutlak antara kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi yaitu sebesar 0,481 dengan signifikan 0,633. Dari hasil tersebut nilai signifikansi yang didapat  $> \alpha = 0,05$  sehingga tidak mampu menolak  $H_{06}$ . Dalam hal ini berarti variabel komitmen organisasi tidak dapat berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas keuangan.



Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Suhartono dan Solichin (2006), yang menyatakan komitmen organisasi berperan sebagai pemoderasi dalam kaitannya dengan anggaran. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian Darma (2004) dimana komitmen organisasi tidak dapat berperan sebagai variabel pemoderasi variabel kejelasan sasaran anggaran dan dampaknya. Hal ini dikarenakan penilaian mengenai komitmen organisasi yang merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya di Kabupaten Demak masih rendah. Rendahnya komitmen organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti seperti usia, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja.

Bambang L.S. (2003) dalam Darma (2004) mengemukakan berdasar teori kontijensi bahwa variabel kontijensi atau *contextual factors* (termasuk komitmen organisasi) perlu diteliti terus guna menemukan kondisi yang paling *fit* dalam desain pengendalian manajemen pada masing-masing tempat dan bagi masing-masing organisasi. Hal tersebut karena kondisi paling *fit* akan berbeda bagi setiap entitas sesuai teori kontijensi tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil regresi moderasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya didapat bahwa model yang dikembangkan dalam penelitian ini menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini:

- a. penerapan *good governance* terbukti berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.
- b. penerapan standar akuntansi pemerintah terbukti berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.
- c. kejelasan sasaran anggaran terbukti berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.
- d. penerapan *good governance* dengan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas keuangan tidak signifikan, sehingga variabel komitmen organisasi tidak dapat berperan sebagai variabel moderasi.
- e. penerapan standar akuntansi pemerintah dengan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas keuangan tidak signifikan, sehingga variabel komitmen organisasi tidak dapat berperan sebagai variabel moderasi.
- f. kejelasan sasaran anggaran dengan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas keuangan tidak signifikan, sehingga variabel komitmen organisasi tidak dapat berperan sebagai variabel moderasi.

## 5.2 Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

- a. peneliti hanya menyebarkan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pernyataan lisan, sehingga kemungkinan jawaban responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- b. hasil penelitian ini hanya dapat dijadikan analisis pada obyek penelitian yang terbatas pada pemerintahan Kabupaten Demak, sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian dan kesimpulan apabila penelitian dilakukan pada obyek penelitian yang berbeda.

## 5.3 Saran Penelitian

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu

- a. melakukan wawancara langsung dengan responden, sehingga dapat diperoleh jawaban yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Persepsi responden yang hanya disampaikan lewat pernyataan kuesioner saja belum tentu mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.
- b. menggunakan sampel yang lebih luas, tidak hanya pada pemerintahan Kabupaten Demak. Mungkin bisa dikembangkan pada pemerintahan sejawat tengah.

## 5.4 Implikasi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintahan Kabupaten Demak dalam melakukan perbaikan tata kelola laporan keuangan pemerintah daerah serta memberikan masukan dalam penentuan arah kebijakan yang berkaitan dengan strategi pencapaian akuntabilitas pengelolaan keuangan negara atau daerah yang berkualitas sehingga diharapkan tidak muncul lagi opini *disclaimer* dari BPK atas laporan keuangan pemerintah tahun-tahun berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Arisanti (2010), Pengaruh Budaya, Komitmen Organisasi, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, vol. 9, No. 2 Agustus 2010 : 118-134.
- Abdullah, Hilmi, 2005, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, *Kompak*, Nomor 13, Januari-April 2005 hal. 37-67.
- Aboebakar, Zulfikri, 2007, Akuntabilitas Keuangan Negara Publikasi, *Lex Jurnalica*, vol.4 no 3, Agustus 2007
- Apriadi, Aap (2010), Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, tersedia di <http://aapapriadi.blogspot.com/2011/09/pengaruh-kejelasan-sasaran-anggaran-dan.html>, (29 Desember 2011)
- Basri, Yesi Mutia (2010), Pengaruh Pemahaman Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah: Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi, *Jurnal Akuntabilitas*. E-Journal
- Darma, Emile Setia (2004), Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Se-Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Effendi, Asep (2010), Akuntansi Sektor Publik, tersedia di <http://www.scribd.com/doc/26654009/sektor-publik-by-Asep-Effendi-R-USB-YPKP-Bandung> ( 1 Desember 2011)
- Ghozali, Imam (2011), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul (2004), Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta
- <http://hariansemarangbanget.blogspot.com/2011/08/kinerja-pansus-dinilai-tak-optimal.htm>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2006), Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrua dalam Akuntansi Pemerintahan Indonesia.
- Krina, Lolina Lalolo (2003), Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, *Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta*.
- Mahmudi. 2005. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.

- Mardiasmo (2002), *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo (2003), Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. 29 September 2003 Yogyakarta.
- Mardiasmo (2004), Membangun Akuntabilitas Publik Keuangan Negara, Cetakan *Majalah Media Akuntansi*, Edisi No. 39, April.
- Mardiasmo (2006), Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol 2, No 1, Mei 2006.
- Nazier, Daeng M, Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten, dan Kota Melalui Harmonisasi Kepmendagri 29/2002/ dan PP 24/ 2005, dapat di akses di [www.ksap.org/Seminar/keynote\\_daeng.pdf](http://www.ksap.org/Seminar/keynote_daeng.pdf)
- Nurgiyantoro, Burhan, Gunawan dan Marzuki (2004), *Statistik Terapan : Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Cetakan Ketiga (Revisi), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Putri, Natalia Dewinda (2010), Pengaruh Komitmen Organisasional dan peran manajer pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah, *Skripsi*, Universitas Diponegoro
- Republik Indonesia, Undang-undang RI No.32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Siaran Pers BPK RI, 6 Oktober 2011
- Simanjuntak, Binsar (2010), Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan Indonesia, Disampaikan pada Kongres XI Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta, 9 Desember 2010.
- Sukhemi (2010), Pengaruh Penyajian Neraca Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Jurnal AKMENIKA UPY*, Volume 5, 2010.
- Suhartono dan Solichin (2006), Pengaruh Kejelasan sasaran anggaran terhadap instansi pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.
- Sugiyono (2005), *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kedelapan. CV Alfabeta. Bandung.

Widyaningsih, dkk (2011), Hubungan Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*

Wisnu, H.S. (2007), Persepsi Stakeholder Terhadap Kriteria Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Tesis S2*, Magister Akuntansi UGM (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.

Wulandari, Nur Endah, 2011, Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi, *Skripsi*, Universitas Diponegoro Semarang

[www.bpk.co.id](http://www.bpk.co.id)

[www.SuaraMerdeka.com](http://www.SuaraMerdeka.com) (18 Juni 2011)

Zeyn, Elvira (2011), Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Universitas Muhammadiyah Malang.

STIE BPD Jateng

# LAMPIRAN 1

Kuesioner

STIE BPPD Jateng

## IDENTITAS PENELITI

Saya seorang mahasiswa pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng Semarang, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Dwi Purwanti

NIM : 1A081267

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi (S1)

Sekolah : STIE Bank BPD Jateng, Jl. Pemuda No. 4a Semarang

Bermaksud melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintah, Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi** pada instansi pemerintahan Kabupaten Demak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjalani ujian tahap akhir untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Saya memohon kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk bersedia mengisi angket ini sesuai dengan hati nurani Bapak/Ibu/Saudara sendiri, demi kelancaran tugas yang diberikan kepada saya.

Demikianlah atas kerja samanya, tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih.

Peneliti,

( Dwi Purwanti )





## B. PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PERNYATAAN

1. Bapak/Ibu dimohon menjawab pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan persepsi dan kondisi sebenarnya.
2. Bapak/Ibu dapat memberikan checklist (  $\checkmark$  ) pada salah satu jawaban pada kolom yang telah disediakan. Bila Bapak/Ibu ingin memperbaiki jawaban yang telah Bapak/Ibu buat, maka berilah tanda sama dengan ( = ), kemudian pilih dan berilah tanda checklist pada jawaban terbaru yang benar, dimana :

A. Untuk pertanyaan mengenai Akuntabilitas Keuangan (Y), Kejelasan Sasaran Anggaran ( $X_3$ ) dan Komitmen Organisasi (M).

- a. STS =Sangat Tidak Setuju diberi skor 1
- b. TS =Tidak Setuju diberi skor 2
- c. N =Netral diberi skor 3
- d. S =Setuju diberi skor 4
- e. SS =Sangat Setuju diberi skor 5

B. Untuk pertanyaan mengenai Good Governance ( $X_1$ ) dan Standar Akuntabilitas Keuangan ( $X_2$ )

1	2	3	4	5
Tidak pernah				selalu

## Kuesioner

### Pengaruh *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi

No	Akuntabilitas Keuangan (Y)	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Laporan keuangan tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengguna dana baik dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari masyarakat.	1	2	3	4	5
2.	Jenis dan bentuk laporan keuangan tersebut adalah seperti yang telah diatur dalam peraturan pemerintah tentang pertanggungjawaban pemerintah daerah (yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas serta penjelasan atas laporan keuangan tersebut)	1	2	3	4	5
3.	Laporan keuangan yang dibuat disajikan secara tepat waktu	1	2	3	4	5
4.	Laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa (auditor) yang independen yaitu dari BPK (badan pemeriksa keuangan) guna memastikan bahwa laporan tersebut dibuat dan disajikan secara baik dan benar (sesuai dengan perundang-undangan).	1	2	3	4	5
5.	Pemerintah daerah merespon (tanggap secara cepat) terhadap hasil pemeriksaan (audit) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	1	2	3	4	5

No.	<b>Good Governance (X<sub>1</sub>)</b>	<b>Jawaban</b>				
1.	Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung-jawab.	1	2	3	4	5
2.	Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.	1	2	3	4	5
3.	Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol, bersifat terbuka	1	2	3	4	5
4.	Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.	1	2	3	4	5
5.	Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.	1	2	3	4	5
6.	Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.	1	2	3	4	5
7.	Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku.	1	2	3	4	5
8.	Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.	1	2	3	4	5
9.	Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa maupun media komunikasi personal.	1	2	3	4	5
10.	Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.	1	2	3	4	5

No.	Standar Akuntansi Pemerintah ( X <sub>2</sub> )	Jawaban				
1.	Menggunakan informasi laporan keuangan yang dihasilkan sebagai alat evaluasi dan koreksi atas kegiatan di masa lalu untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya.	1	2	3	4	5
2.	Menjadikan informasi dalam Laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya	1	2	3	4	5
3.	Menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.	1	2	3	4	5
4.	Mengungkap dengan jelas informasi akuntansi dalam laporan keuangan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan	1	2	3	4	5
5.	Menyesuaikan semua pencatatan atas pengeluaran atau belanja dengan jumlah uang yang digunakan dan didukung bukti transaksi.	1	2	3	4	5
6.	Hasil audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat tidak berbeda dengan hasil audit yang dilakukan oleh BPK.	1	2	3	4	5
7.	Menyajikan setiap informasi dalam laporan keuangan yang ditujukan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada pihak-pihak tertentu.	1	2	3	4	5
8.	Menyajikan dan mengklasifikasi pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan antar periode secara konsisten.	1	2	3	4	5
9.	Mengidentifikasi kecenderungan ( <i>trend</i> ) posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran.	1	2	3	4	5
10.	Menyajikan dalam laporan keuangan, perbandingan kinerja antara suatu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya.	1	2	3	4	5

11.	Menampilkan dalam bentuk tabel, diagram ataupun grafik, hasil kinerja pemerintah dalam pertanggungjawaban laporan keuangan.	1	2	3	4	5
-----	---	---	---	---	---	---

No.	Kejelasan Sasaran Anggaran (X <sub>3</sub> )	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Sasaran-sasaran anggaran satuan kerja yang terdapat dalam APBD, harus diuraikan secara jelas dan spesifik, sehingga saya dapat memahaminya dengan yakin.	1	2	3	4	5
2.	Saya merasa sasaran-sasaran anggaran satuan kerja saya terdapat dalam APBD, tidak membingungkan saya.	1	2	3	4	5
3.	Saya menyadari sasaran anggaran satuan kerja pada APBD tersebut merupakan hal yang penting sehingga penyelesaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan dalam anggaran tersebut perlu diprioritaskan.	1	2	3	4	5

No	Komitmen Organisasi (M)	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya merasa memiliki dinas ini, sehingga saya bekerja semaksimal mungkin demi dinas tempat saya bekerja sekarang.	1	2	3	4	5
2.	Saya memiliki hubungan emosional dengan tempat saya bekerja.	1	2	3	4	5
3.	Dinas ini memiliki arti penting bagi diri saya	1	2	3	4	5
4.	Saya tidak ingin mencoba bekerja di organisasi lain.	1	2	3	4	5
5.	Saya belum tentu mendapat pendapatan yang sama di dinas lain seperti di tempat saya bekerja sekarang.	1	2	3	4	5
6.	Saya akan mengeluarkan banyak biaya apabila saya mencoba mencari pekerjaan di dinas lain.	1	2	3	4	5
7.	Saya berkeinginan untuk selalu menjaga keanggotaan / loyal terhadap dinas.	1	2	3	4	5
8.	Saya berkeinginan etika kerja terjaga dengan baik.	1	2	3	4	5

Dengan tulus saya menghargai waktu dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr/i. Mohon periksa kembali untuk memastikan bahwa anda tidak melewatkan satupun pertanyaan secara tidak sengaja, dan kemudian masukkan kuesioner ini kedalam kotak yang telah ditandai untuk penelitian ini, di koridor departemen Bapak/Ibu/Sdr/i.

Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

# LAMPIRAN 2

Hasil Kuesioner

STIE BPPD Jateng



## Hasil Kuesioner

No. Resp	Good Governance (X1)											Standar Akuntansi Pemerintah (X2)											Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)				Komitmen Organisasi (Z)								Akuntabilitas Keuangan (Y)							
	Pertanyaan											Pertanyaan											Pertanyaan				Pertanyaan								Pertanyaan							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jml	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jml	1	2	3	Jml	1	2	3	4	5	6	7	8	Jml	1	2	3	4	5	Jml
1	4	5	3	2	4	4	5	4	5	5	41	4	4	5	4	5	2	5	5	4	4	4	46	5	3	4	12	4	4	4	4	4	2	4	5	31	5	4	5	5	5	24
2	4	5	3	4	4	4	5	5	4	4	42	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	49	4	4	4	12	5	4	4	3	3	2	4	4	29	5	4	5	5	4	23
3	4	4	4	5	3	4	3	4	3	4	38	4	5	4	3	4	3	3	5	4	4	4	43	5	4	4	13	5	3	5	3	4	3	4	2	29	5	4	5	4	4	22
4	4	3	4	2	3	5	4	4	4	4	37	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	42	4	4	5	13	4	4	5	3	4	3	4	5	32	4	5	4	4	4	21
5	5	4	4	5	4	4	3	4	4	4	41	4	4	4	4	4	2	5	5	4	4	4	44	5	3	4	12	5	4	4	4	4	2	4	5	32	5	5	4	5	5	24
6	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	45	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	52	5	5	5	15	5	5	5	2	3	1	4	5	30	5	5	5	5	5	25
7	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	37	4	5	4	5	4	3	4	4	4	5	3	45	2	5	5	12	5	5	5	2	2	2	5	5	31	4	2	4	4	5	19
8	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	35	5	3	3	3	4	2	4	3	4	3	2	36	4	4	4	12	4	4	4	3	2	2	4	5	28	4	4	4	4	5	21
9	4	4	5	4	4	5	5	5	4	5	45	5	4	5	5	5	3	5	5	5	4	4	50	5	5	5	15	5	5	5	3	1	1	5	5	30	5	5	5	5	5	25
10	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	38	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	42	3	3	3	9	3	4	4	4	3	3	5	5	31	4	5	4	5	4	22
11	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	40	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46	4	5	4	13	5	5	5	4	3	3	5	5	35	5	5	4	5	5	24
12	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	42	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	49	5	4	4	13	5	5	5	4	4	4	5	4	36	4	4	4	5	5	22
13	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	43	4	3	5	4	5	4	5	4	4	4	5	47	5	4	4	13	5	5	4	2	3	4	5	5	33	5	4	5	5	5	24
14	5	4	3	3	4	4	3	3	4	4	37	4	4	4	4	2	3	4	4	3	4	4	40	4	3	4	11	3	3	3	3	3	3	3	4	25	4	4	4	4	4	20
15	4	3	5	3	4	5	4	5	5	4	42	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	40	4	5	4	13	3	4	4	3	3	4	4	5	30	4	4	4	5	4	21
16	3	3	4	3	4	4	4	4	5	5	39	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	43	4	4	5	13	4	4	4	3	3	3	3	4	28	4	3	5	4	4	20
17	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39	5	5	5	3	4	4	3	5	4	4	4	46	3	4	5	12	3	2	4	4	2	2	4	2	23	4	4	4	4	4	20
18	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	39	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	45	5	4	4	13	5	2	5	3	3	2	5	5	30	5	4	4	4	4	21
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	45	4	4	4	12	5	3	4	4	4	4	5	5	34	4	4	5	4	5	22
20	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	4	4	12	4	4	4	3	3	3	4	4	29	4	4	4	4	4	20
21	4	5	4	3	3	4	5	5	4	4	41	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	3	47	5	5	4	14	5	4	4	5	2	1	5	5	31	5	5	5	5	5	25
22	2	3	3	2	5	3	4	5	4	4	35	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	53	4	5	4	13	4	4	4	2	3	3	4	4	28	5	5	4	4	4	22	
23	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	43	4	4	3	11	4	2	4	3	3	2	4	4	26	4	4	4	4	4	20

No. Resp	Good Governance (X1)											Standar Akuntansi Pemerintah (X2)											Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)				Komitmen Organisasi (Z)								Akuntabilitas Keuangan (Y)							
	Pertanyaan											Pertanyaan											Pertanyaan				Pertanyaan								Pertanyaan							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jml	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jml	1	2	3	Jml	1	2	3	4	5	6	7	8	Jml	1	2	3	4	5	Jml
24	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	45	5	4	3	5	3	4	4	5	5	5	5	48	4	5	5	14	4	4	4	2	2	2	4	5	27	5	5	5	5	5	25
25	4	4	3	4	4	4	5	5	5	5	43	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	53	4	4	4	12	5	4	4	3	3	3	4	5	31	5	5	5	5	5	25
26	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	42	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	50	4	5	5	14	5	4	4	2	2	3	4	5	29	5	5	5	5	4	24
27	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	40	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	52	4	3	5	12	4	4	4	2	2	2	4	5	27	5	5	5	5	5	25
28	4	2	2	4	4	3	5	5	5	5	39	4	3	3	4	3	4	3	5	3	5	5	42	2	2	3	7	5	4	4	3	3	3	4	5	31	4	5	3	3	3	18
29	3	3	3	3	3	2	4	4	4	4	33	5	4	5	4	5	3	4	4	4	4	4	46	4	4	4	12	5	4	5	3	3	1	4	4	29	4	4	5	4	4	21
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	46	5	4	5	14	5	2	4	4	4	2	4	4	29	5	5	5	5	5	25
31	4	3	4	4	3	4	4	4	2	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	4	4	4	12	4	4	4	3	3	3	4	4	29	5	4	4	4	4	21
32	3	3	4	5	5	3	4	4	3	4	38	3	3	5	3	4	4	4	3	4	3	4	40	5	3	3	11	4	2	3	2	2	2	4	2	21	3	4	5	4	5	21
33	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	45	5	5	5	15	4	2	3	2	2	2	4	2	21	4	5	5	5	4	23
34	2	3	2	2	4	2	4	2	3	4	28	4	4	3	4	4	4	3	4	4	5	43	5	4	4	13	4	4	4	3	2	4	5	5	31	4	4	3	5	5	21	
35	5	5	4	5	4	3	4	4	3	4	41	4	4	4	5	4	4	5	4	4	3	3	44	4	4	4	12	4	2	4	2	2	2	4	1	21	5	5	5	4	4	23
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	43	3	3	2	8	5	4	5	5	4	4	4	4	35	4	4	4	5	5	22
37	4	3	3	4	5	5	5	5	5	4	43	5	5	5	5	5	4	5	5	3	3	5	50	5	4	5	14	5	4	4	4	5	4	4	4	34	4	5	5	5	5	24
38	3	3	5	2	4	4	4	4	4	4	37	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	50	4	5	4	13	4	4	5	4	5	4	5	5	36	4	5	5	5	5	24
39	3	3	3	4	4	4	4	5	5	4	39	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	48	4	4	5	13	5	4	4	5	4	4	4	4	34	4	4	4	4	4	20
40	5	4	3	3	4	4	4	5	5	4	41	4	4	5	4	2	2	4	4	3	4	4	40	5	4	4	13	5	2	4	3	4	2	4	4	28	4	4	5	5	5	23
41	3	3	2	1	2	4	3	5	3	4	30	4	4	5	3	5	4	4	2	4	2	4	41	5	4	5	14	4	2	3	3	3	3	4	5	27	4	5	4	5	4	22
42	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	37	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	42	4	3	4	11	4	3	4	2	3	2	3	4	25	4	4	4	4	4	20
43	4	4	4	3	2	3	4	4	4	4	36	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	40	4	4	4	12	4	4	5	2	2	2	4	4	27	4	4	4	4	4	20
44	4	2	3	3	3	4	4	2	3	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	4	4	12	4	4	4	2	4	2	4	4	28	4	4	4	4	4	20
45	5	4	4	4	4	4	3	4	3	4	39	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	42	3	3	4	10	4	2	2	3	1	1	4	4	21	5	4	5	4	4	22
46	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	34	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	42	1	3	2	6	4	2	3	3	4	3	3	2	24	3	4	5	4	4	20

# LAMPIRAN 3

Tabel R Product Moment

## r Product-Moment

**Tabel Harga Kritik dari r Product-Moment**

n (1)	Taraf Signifikansi		n (1)	Taraf Signifikansi		n (1)	Taraf Signifikansi	
	5% (2)	1% (3)		5% (2)	1% (3)		5% (2)	1% (3)
3	0,997	0.999	26	0.388	0.496	55	0.266	0.245
4	0,950	0.990	27	0.381	0.487	60	0.254	0.330
5	0,878	0.059	28	0.374	0.878	65	0.244	0.317
6	0,811	0.917	29	0.367	0.470	70	0.235	0.306
7	0,754	0.874	30	0.361	0.463	75	0.227	0.296
8	0,707	0.874	31	0.355	0.456	80	0.220	0.286
9	0,666	0.798	32	0.349	0.449	85	0.213	0.278
10	0,632	0.765	33	0.344	0.442	90	0.207	0.270
11	0,602	0.735	34	0.339	0.436	95	0.202	0.263
12	0,576	0.780	35	0.334	0.430	100	0.195	0.256
13	0,553	0.648	36	0.329	0.424	125	0.176	0.230
14	0,532	0.661	37	0.325	0.418	150	0.159	0.210
15	0,514	0.641	38	0.320	0.413	175	0.148	0.194
16	0,497	0.623	39	0.316	0.408	200	0.138	0.181
17	0,482	0.606	40	0.312	0.403	300	0.113	0.148
18	0,468	0.590	41	0.308	0.396	400	0.098	0.128
19	0,456	0.575	42	0.304	0.393	500	0.088	0.115
20	0,444	0.561	43	0.301	0.389	600	0.080	0.105
21	0,433	0.549	44	0.297	0.384	700	0.074	0.097
22	0,423	0.537	45	0.294	0.380	800	0.070	0.091
23	0,413	0.526	46	0.291	0.276	900	0.065	0.086
24	0,404	0.515	47	0.288	0.372	1000	0.062	0.081
25	0,396	0.505	48	0.284	0.368			
			49	0.281	0.364			
			50	0.297	0.361			

Sumber : (Burhan Nurgiyantoro, Gunawan dan Marzuki,2004:380)

# LAMPIRAN 4

Hasil Validitas & Reliabilitas

STIE BPPD Jateng

## Reliability Akuntabilitas Keuangan

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	46	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	46	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.688	5

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00037	17.7174	2.607	.428	.644
VAR00038	17.7391	2.597	.348	.684
VAR00039	17.6304	2.638	.392	.660
VAR00040	17.6087	2.332	.654	.547
VAR00041	17.6522	2.676	.424	.646

### Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
22.0870	3.726	1.93018	5

## Reliability *Good Governance*

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	46	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	46	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.705	10

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	34.8696	11.227	.375	.680
VAR00002	35.1087	11.521	.335	.687
VAR00003	35.0870	10.792	.403	.675
VAR00004	35.3043	10.928	.329	.693
VAR00005	34.9565	11.820	.332	.687
VAR00006	34.8913	11.521	.404	.676
VAR00007	34.6739	12.180	.327	.689
VAR00008	34.5652	11.007	.465	.664
VAR00009	34.8043	11.405	.367	.681
VAR00010	34.5870	12.559	.381	.688

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
38.7609	13.742	3.70696	10

STIE BPD Jateng



## Reliability Standar Akuntansi Pemerintah

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	46	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	46	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.781	11

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00012	40.7174	13.141	.540	.756
VAR00013	40.8696	12.560	.545	.751
VAR00014	40.6304	12.905	.445	.763
VAR00015	40.9783	12.555	.547	.751
VAR00016	40.9783	12.911	.374	.772
VAR00017	41.3261	13.025	.330	.779
VAR00018	40.8261	13.302	.414	.766
VAR00019	40.8696	13.094	.417	.766
VAR00020	41.0435	13.243	.478	.761
VAR00021	41.0435	13.020	.418	.766
VAR00022	40.9348	13.307	.343	.775

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
45.0217	15.400	3.92422	11

STIE BPD Jateng

## Reliability Kejelasan Sasaran Anggaran

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	46	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	46	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.666	3

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00024	8.1087	1.699	.406	.687
VAR00025	8.2391	1.919	.479	.572
VAR00026	8.0870	1.770	.568	.457

### Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
12.2174	3.463	1.86086	3

## Reliability Komitmen Organisasi

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	46	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	46	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.709	8

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00028	24.6739	13.202	.366	.690
VAR00029	25.4783	10.966	.505	.655
VAR00030	24.9348	12.462	.507	.665
VAR00031	25.9783	12.288	.368	.688
VAR00032	26.0435	12.087	.359	.691
VAR00033	26.4565	12.254	.338	.696
VAR00034	24.8913	13.299	.424	.684
VAR00035	24.8478	11.243	.427	.677

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
29.0435	15.331	3.91553	8

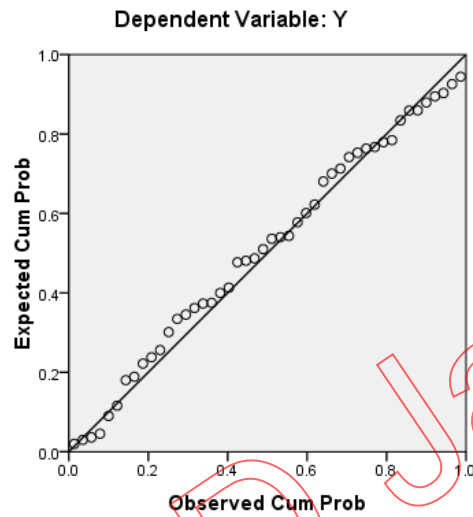
# LAMPIRAN 5

Hasil Uji Normalitas

STIE BPPD Jateng

charts

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		residual
N		46
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000
	Std. Deviation	1.25240
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.054
	Negative	-.065
Kolmogorov-Smirnov Z		.438
Asymp. Sig. (2-tailed)		.991
a. Test distribution is Normal.		

# LAMPIRAN 6

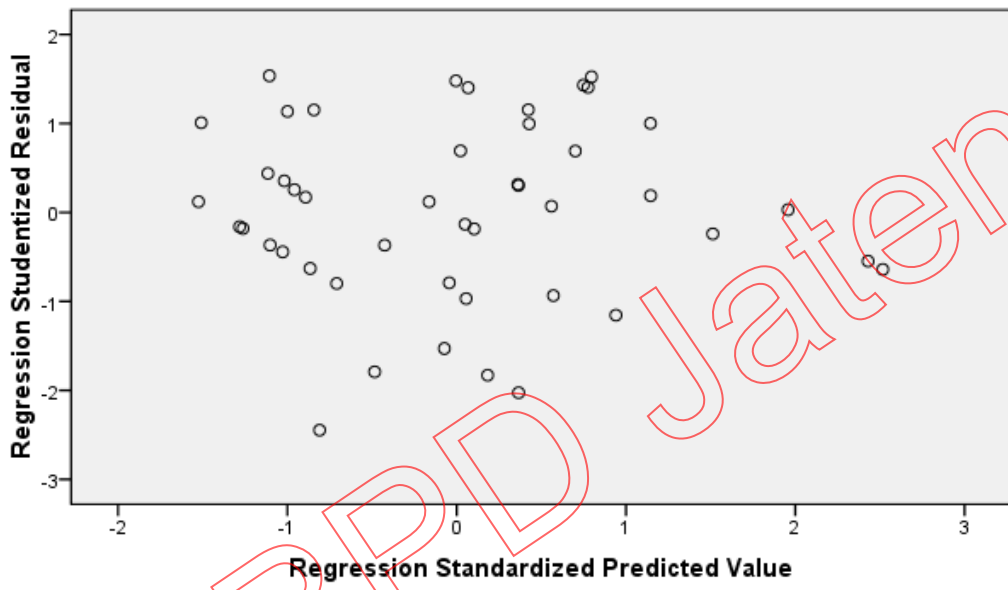
Hasil Uji Heteroskedastisitas

STIE BPPD Jateng

# Charts

## Scatterplot

Dependent Variable: Y





# LAMPIRAN 7

Hasil Regresi Moderasi

STIE BPPD Jateng

## Regression

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.761 <sup>a</sup>	.579	.501	1.36288

a. Predictors: (Constant), SNM3, Zscore(X2), SNM1, Zscore(Z), SNM2, Zscore(X3), Zscore(X1)

b. Dependent Variable: Y

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	97.070	7	13.867	7.466	.000 <sup>a</sup>
	Residual	70.582	38	1.857		
	Total	167.652	45			

a. Predictors: (Constant), SNM3, Zscore(X2), SNM1, Zscore(Z), SNM2, Zscore(X3), Zscore(X1)

b. Dependent Variable: Y

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	21.619	.420		51.530	.000		
	Zscore(X1)	.694	.265	.360	2.620	.013	.588	1.702
	Zscore(X2)	.551	.258	.286	2.140	.039	.622	1.608
	Zscore(X3)	.626	.264	.324	2.367	.023	.591	1.692
	Zscore(Z)	.055	.226	.028	.242	.810	.805	1.243
	SNM1	.135	.340	.053	.398	.693	.614	1.630
	SNM2	.215	.368	.073	.585	.562	.706	1.416
	SNM3	.138	.288	.064	.481	.633	.624	1.602

a. Dependent Variable: Y

# LAMPIRAN 8

Surat Keterangan

STIE BPPD Jateng



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Kyai Jebat No. 29, Telp. (0291)-685322 Psw. 124 Fax. (0291) 695664 Kode Pos 59511  
<http://www.demakkab.go.id>, e-mai : [kesbangpolinmas@demakkab.go.id](mailto:kesbangpolinmas@demakkab.go.id)

**SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN**  
**( S P P )**

NOMOR 071 / 82 / V / 2012

- MEMBACA : Surat dari STIE Bank BPD Jawa Tengah Nomor 289 / STIE / I / 04 / 2012 Tanggal 19 April 2012 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.
- MENGINGAT : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Demak;
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak;
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SD.6/2/12 Tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survei diwajibkan melapor diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
4. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP)
- MEMPERHATIKAN : Proposal Penelitian Ybs.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

- NAMA : DWI PURWANTI  
ALAMAT : Kauman Timur No 42 Semarang  
PEKERJAAN : Mahasiswa  
KEBANGSAAN : Indonesia  
JUDUL PENELITIAN : Pengaruh *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi
- BIDANG : Sosial Ekonomi  
LOKASI : Kabupaten Demak  
LAMA : 1 Mei - 1 Agustus 2012
- PENELITIAN/KEGIATAN :  
STATUS PENELITIAN : Baru  
PENGIKUT PESERTA : -  
PENANGGUNGJAWAB : PIJI PAKARTI, SE, M.Si  
SPONSOR : -
- MAKSUD DAN TUJUAN : Mengetahui pengaruh *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi pada Dinas/Instansi di Kabupaten Demak.

**AKAN MELAKUKAN PENELITIAN DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati c.q. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
5. Hasil kajian segera diserahkan 2 (dua) eksemplar kepada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak dan Bappeda Kabupaten Demak.
6. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Dikeluarkan : Demak  
Pada tanggal : 1 Mei 2012

a.n. BUPATI DEMAK  
KEPALA KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS  
U.b Ka. Sub. Bag Tata Usaha  
  
MAFTUKHAT KURNIAWATI, SH, MH  
Penata Tk. I  
NIP. 19710122 199703 2 002

TEMBUSAN : dikirim kepada Yth :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Demak;
2. Kepala DINDIKPORA Kabupaten Demak;
3. Kepala DINKES Kabupaten Demak;
4. Kepala DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Demak;
5. Kepala DINHUBKOMINFO Kabupaten Demak;
6. Kepala DINDUKCAPIL Kabupaten Demak;
7. Kepala DINPARBUD Kabupaten Demak;
8. Kepala DPUPPE Kabupaten Demak;
9. Kepala DINPERINDAGKOP UMKM Kabupaten Demak;
10. Kepala DINPERTAN Kabupaten Demak;
11. Kepala DINLUTKAN Kabupaten Demak;
12. Kepala DPKKD Kabupaten Demak;
13. Arsip.

# LAMPIRAN 9

Daftar Riwayat Hidup

STIE BPD Jateng

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dwi Purwanti

Tempat, tanggal lahir : Kendal, 27 Agustus 1990

Alamat : Ketapang Rt 09/ III No. 5  
Kendal 51319

Status : Belum Menikah

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

CP : 085643937672

E-mail : [dp.purwanti@gmail.com](mailto:dp.purwanti@gmail.com)

Pendidikan Formal :

2008-2012 : STIE Bank BPD Jateng

2005-2008 : SMA N 1 Cepiring

2002-2005 : SMP N 1 Kendal

1996-2002 : SD N 1 Ketapang